

Agus Ahmad Safei  
Dedi Herdiana

# PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

[Studi Multikasus di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara]



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Agus Ahmad Safei  
Dedi Herdiana

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

[Studi Multikasus di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur  
dan Maluku Utara]

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

[Studi Multikasus di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur  
dan Maluku Utara]

Judul:  
PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
BERBASIS KEWIRAUSAHAAN SOSIAL  
[Studi Multikasus di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur  
dan Maluku Utara]

Penulis:  
Agus Ahmad Safei  
Dedi Herdiana

Desain:  
Arif Nurrahman

Penerbit:  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Jalan A.H. Nasution 105 Bandung

Cetakan Pertama:  
November 2021

## KATA PENGANTAR

Berkat Rahman Allah yang Maharahim, buku yang diambil dari hasil riset tentang Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Sosial di Masa Pandemi [Studi Multikasus di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara] melalui skema pembiayaan Litadimas Kemenag RI dapat selesai juga pada akhirnya. Gagasan utama buku ini, yakni tentang peningkatan level kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan sosial, sesungguhnya bukanlah hal baru. Hanya saja, gagasan semacam ini relatif jarang muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan publik luas, termasuk di kalangan akademisi. Padahal, dalam konteks ikhtiar meningkatkan level kesejahteraan masyarakat, ide untuk mengembangkan kewirausahaan sosial menjadi sesuatu yang urgen. Lebih-lebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang secara umum telah membuat tingkat kesejahteraan masyarakat terdegradasi secara signifikan.

Menghadapi situasi demikian, setiap kelompok masyarakat ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berinovasi, dan berwirausaha (*entrepreneurship*), dengan memanfaatkan berbagai formula dalam mengelola beragam potensi riil ekonomi masyarakat. Secara demikian, selain diperlukan penguasaan keterampilan atau kecakapan hidup, juga dibutuhkan formula atau resep peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata-mata tetapi juga berpihak secara kuat pada kepedulian sosial. Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, gagasan yang dibutuhkan tidak hanya berorientasi material dan personal tetapi ide yang bertujuan utama pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks pengembangan dan peningkatan kesejahteraan umat, menarik menelaah lebih jauh terkait fenomena kelahiran lembaga yang bergerak dalam kewirausahaan sosial, atau *social enterprise*, di berbagai daerah di tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Tiga yang kemudian menjadi lokus kajian buku ini adalah East Bali Cashews, Du'Anyam di Larantuka Nusa Tenggara Timur, dan Sidegon di Maluku Utara. Menarik bahwa ketiga institusi kewirausahaan sosial ini juga merepresentasikan komunitas keagamaan yang berbeda: Islam, Kristen dan Hindu.

Secara umum, hasil buku ini menunjukkan: *Pertama*, penting untuk memahami masalah sosial, seperti halnya kesejahteraan masyarakat, dapat diselesaikan dengan melihatnya sebagai aset untuk mengeksplorasi dan mengkomersialkan masalah sosial lokal. Ini mirip dengan gagasan untuk menciptakan nilai bersama oleh Porter dan Kramer (2009) di mana memasukan masalah sosial ke dalam strategi dan operasi bisnis akan memunculkan keunggulan kompetitif dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Ketiga kasus ini juga mencerminkan faktor penting dari pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset.

*Kedua*, selain melihat masalah sosial sebagai aset, ketiga kasus ini menggambarkan betapa menghargai nilai-nilai, budaya, dan tradisi penduduk local berkontribusi pada pengembangan kesejahteraan warga lokal. Kasus-kasus ini membawa contoh yang baik untuk mengidentifikasi 'aset' sebagai gagasan beragam dari keterampilan, sumber daya manusia, dan dinamika hubungan sosial seperti kepercayaan yang berfungsi sebagai pelumas untuk bisnis kewirausahaan sosial

Ucapan syukur yang tidak terkira kepada Allah SWT atas karunia amat besar yang bernama kesempatan melakukan penelitian ke tiga provinsi yang ada di

Timur Indonesia, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atas dorongan dan dukungan yang amat besar. Terima kasih kepada Ketua LPPM dan, terutama, kepada Ketua Puslit UIN SGD Bandung atas semua dukungannya. Terima kasih kepada para pimpinan dan staf di East Bali Cashew, Du-Anyam Nusa Tenggara Timur dan Sidegon di Maluku Utara, atas segenap informasi dan kebaikan hati yang kami terima selama penelitian berlangsung. Untuk semua penerimaannya, kami sampaikan terima kasih.

Akhirnya, hanya kepada Allah saja semua urusan dikembalikan. Semoga riset yang kami lakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara ini memberikan manfaat yang besar bagi upaya kreatif peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kewirausahaan sosial. Baik buruknya karya ini, biarlah sejarah yang akan menjadi saksi.

Bandung, November 2021

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ 3

DAFTAR ISI ~ 5

BAGIAN 1

KORPUS PEMBUKA

- A. Latar Belakang Penelitian ~ 6
- B. Fokus Penelitian ~ 8

BAGIAN 2

KORPUS LITERATUR

- A. Konsep Kewirausahaan Sosial ~ 9
- B. Riset Terdahulu ~ 13
- C. Dinamika Pengembangan Masyarakat ~ 14
- D. Model Pengembangan Masyarakat ~ 19
- E. Program Pengembangan Masyarakat ~ 24
- F. Pengembangan Kapasitas Masyarakat ~ 26
- G. Mengubah Ketidakberdayaan dengan Pemberdayaan ~ 27

BAGIAN 3

METODE PENELITIAN

- A. Obyek Penelitian ~ 30
- B. Subyek Penelitian ~ 30
- C. Pendekatan Penelitian ~ 30

BAGIAN 4

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bisnis Mikro untuk Pengembangan Masyarakat ~ 33
- B. Inklusivitas Wirausaha ~ 33
- C. Studi Kasus 1: East Bali Cashews ~ 34
- D. Studi Kasus 2: Du' Anyam (Larantuka, Nusa Tenggara Timur) ~ 39
- E. Studi Kasus 3: Sidegon (Maluku Utara) ~ 42
- F. Perusahaan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Warga Lokal ~ 45

BAGIAN 5

KORPUS PENUTUP

REFERENSI ~ 50

## BAGIAN 1 KORPUS PEMBUKA

### A. Latar Belakang Penelitian

Gagasan tentang peningkatan level kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan sosial sesungguhnya bukanlah hal baru. Gagasan semacam ini relatif jarang muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan publik luas. Padahal, dalam konteks ikhtiar meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, ide untuk mengembangkan kewirausahaan sosial menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Lebih-lebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang secara umum telah membuat tingkat kesejahteraan masyarakat terdegradasi secara signifikan.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemic Covid-19, baik berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun Mikro yang berlaku di hampir seluruh daerah di Indonesia meniscayakan kegiatan warga masyarakat harus lebih banyak dilakukan dari rumah tinggal masing-masing, atau secara online. Situasi demikian tentu saja menggerus tingkat daya beli masyarakat yang dipaksa oleh keadaan untuk banyak tinggal di dalam rumah. Hal demikian terjadi karena selama ini berbagai kegiatan ekonomi terutama bagi keluarga miskin dan rentan yang bekerja di sektor informal dilakukan secara konvensional.

Dalam situasi demikian, setiap kelompok masyarakat (komunitas keagamaan) ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berinovasi, dan berwirausaha (*entrepreneurship*), dengan memanfaatkan berbagai formula dalam mengelola beragam potensi riil ekonomi masyarakat. Dengan demikian, selain diperlukan penguasaan keterampilan atau kecakapan hidup, juga dibutuhkan formula atau resep peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata-mata tetapi juga berpihak secara kuat pada kepedulian sosial. Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, gagasan yang dibutuhkan tidak hanya berorientasi material dan personal tetapi ide yang bertujuan utama pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Indonesia dikenal luas sebagai negara dengan penduduk paling peduli atau dermawan di dunia. Riset yang dilakukan oleh Charities Aids Foundation (2018) menunjukkan Indonesia berada di peringkat teratas dari 144 negara yang disurvei. Tidak hanya itu, pada sektor bisnis dan kewirausahaan, sampai dengan tahun 2018, terdapat 342.000 usaha sosial-kreatif yang berkembang di Indonesia. Sementara itu, saat ini sektor yang paling diminati adalah industri kuliner (33%) mode (17%), kerajinan (12%), serta edu dan eko-turisme (12%).

Usaha sosial-kreatif ini merujuk pada kewirausahaan yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif dengan visi sosial dengan menginvestasikan kembali laba usahanya secara signifikan untuk pengembangan visi tersebut. Dengan demikian,

keberadaan sektor usaha ini sangat membantu mengatasi beragam problem sosial ekonomi yang ada di masyarakat.

Dalam beberapa waktu belakangan, muncul sejumlah lembaga yang bercorak kewirausahaan sosial sebagai bagian dari terobosan sosial yang dapat membantu menaikkan level kesejahteraan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Hal demikian dapat dibaca bahwa munculnya fenomena kewirausahaan sosial merupakan sebuah terobosan sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul terutama di masa pandemi ini.

Dalam konteks pengembangan dan peningkatan kesejahteraan umat, menarik diteliti lebih jauh terkait fenomena kelahiran lembaga yang bergerak dalam kewirausahaan sosial, atau *social enterprise*, di berbagai daerah di tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Tiga yang kemudian menjadi lokus penelitian ini adalah East Bali Cashews (Indonesia), Du'Anyam di Larantuka Nusa Tenggara Timur, dan Sidegon di Maluku Utara. Menarik bahwa ketiga kewirausahaan sosial ini juga merepresentasikan komunitas keagamaan yang berbeda: Islam, Kristen dan Hindu.

*Pertama*, East Bali Cashews di Provinsi Bali. East Bali Cashews adalah sebuah perusahaan yang berorientasi pada kewirausahaan sosial. Seperti tercemin pada namanya, East Bali Cashews berada di Provinsi Bali. Di balik keindahan alam dan budayanya yang unik, Bali Timur ternyata merupakan daerah yang cukup miskin. Inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya East Bali Cashews sebagai usaha sosial yang tidak hanya membantu para petani kacang mete di daerah tersebut menjadi lebih sejahtera, namun juga membuka peluang kerja untuk masyarakat di wilayah tersebut. Usaha sosial melalui East Bali Cashews dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi lokal yang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi warga lokal. Gagasan utamanya adalah kegiatan usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas hidup bagi petani dan keluarganya serta masyarakat lokal pada umumnya.

*Kedua*, Du'Anyam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Du'Anyam, yang berarti Ibu Menenun, adalah perusahaan sosial atau wirausaha sosial yang didirikan pada 2014 oleh Azalea Ayuningtyas dengan dua teman baiknya, Melia Winata dan Hanna. Du'Anyam memulai proyek pertamanya di kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini adalah salah satu provinsi termiskin, di mana tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran awal Du'Anyam memang menawarkan solusi untuk masalah kesehatan dan ekonomi yang dihadapi masyarakat setempat. Usaha sosial ini memanfaatkan tradisi tenun yang ada, dengan menyediakan pekerjaan alternatif untuk para wanita.

*Ketiga*, Sidegon di Provinsi Maluku Utara. Sidegon lahir dari proses diskusi online selama Covid-19, yang diinisiasi oleh Si'De'Go. Hasil-hasil diskusi dijadikan bahan untuk merumuskan program kegiatan yang lebih nyata melalui gerak ekonomi untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi, maka dibentuklah Koperasi Sidegon. Kemudian Sidegon mengumpulkan para pelaku UMKM untuk bisa berdagang di lokasi dimaksudkan untuk memberi tempat agar bisa memulihkan kegiatan UMKM yang terancam akibat Covid-19.

## B. Fokus Penelitian

Secara khusus, penelitian bermaksud untuk memahami tentang pentingnya pengembangan *social enterprises* atau kewirausahaan sosial sebagai cara yang bisa ditempuh untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah komunitas keagamaan yang ada di Indonesia. Secara empirik, Indonesia yang dihuni beragam komunitas keagamaan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi umat, lebih-lebih dalam suasana pandemi Covid-19 seperti sekarang yang banyak melahirkan lapisan masyarakat miskin baru akibat terhentinya kegiatan ekonomi.

Berdasarkan studi pendahuluan, ditemukan sejumlah persoalan yang diduga menjadi tantangan besar dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh berbagai komunitas keagamaan yang berbeda di Indonesia. Tantangan itu berupa masalah yang dapat dirumuskan demikian: Bagaimana strategi para pengelola kewirausahaan sosial dalam mengkomersilkan masalah sosial, seperti halnya peningkatan kesejahteraan warga lokal, serta bagaimana mereka memasukan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari pendekatan kewirausahaan social yang mereka jalankan? Fokus penelitian ini didasarkan pada gagasan untuk menciptakan nilai bersama oleh Porter dan Kramer (2009) di mana memasukan masalah sosial ke dalam strategi dan operasi bisnis akan memunculkan keunggulan kompetitif dan kelangsungan bisnis jangka panjang.

Secara akademik, hasil kajian ini diharapkan akan memperkaya dan menawarkan pilihan formula pengembangan kesejahteraan masyarakat khususnya yang bertumpu pada penguatan aspek kewirausahaan sosial. Secara praktis, hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai model empiris dalam pengembangan ekonomi umat yang bertumpu pada kewirausahaan sosial.

## BAGIAN DUA KORPUS LITERATUR

### A. Konsep Kewirausahaan Sosial

Meskipun belum menjadi isu utama di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi dalam beberapa ahun terakhir, fenomena kewirausahaan sosial atau *social enterprise* telah hadir dan berkembang secara pesat beriringan dengan ikhtiar memberikan jalan keluar atas beragam problem sosial, terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dalam pandangan Firdaus (2014), kewirausahaan sosial dapat didefinisikan sebagai ide tentang perubahan sosial yang didasarkan pada pendekatan kewirausahaan. Pada beberapa sisi, kewirausahaan sosial ini merupakan istilah yang sepadan untuk istilah pengembangan komunitas yang yang berpangkal pada bisnis langitan atau *celestial business* (Safei, 2016a). Dalam konsep besar pengembangan masyarakat, pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat berjalan beriringan dengan pengembangan dimensi lainnya (Safei, 2016b).

Dengan demikian, kewirausahaan sesungguhnya dapat mengambil peran sosial dalam pembangunan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, kewirausahaan sosial dapat berperan besar dalam memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan social masyarakat.

Secara empirik, formula “kewirausahaan sosial” dalam pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat hadir sebagai jalan keluar untuk mengatasi tantangan semacam ini. Dalam praktik kehidupan nyata sejauh ini, mulai muncul ke permukaan beragam formula usaha yang menekankan pada tujuan social. Sudah tentu, upaya untuk mengintenasikan pola pandang semacam itu tidak akan lepas dari konflik antara para aktivis pengembangan masyarakat dan dana yang orientasi utamanya bisnis.

Pada skala yang lebih luas, pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat diarahkan untuk tujuan kewirausahaan yang sejatinya tidak dimaksudkan untuk kepetingan bisnis semata-mata (Lyons, 2015). Namun, mengembalikan tujuan pengembangan ekonomi umat tersebut dapat digunakan dengan keterlibatan sosial yang tinggi, untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat yang bersifat sosial. Formula usaha semacam ini menekankan pentingnya ide filantropi, yang bisa saja berkembang sebagai formula ganda untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat (Fortunato dan Alter, 2015).

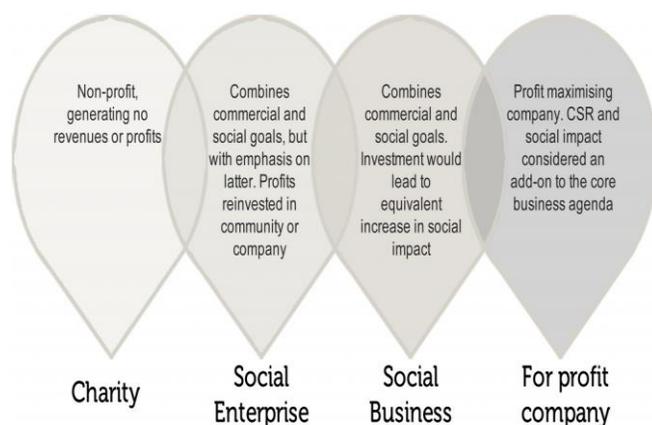
Dalam pandangan Saragih (2017), modal utama yang dibutuhkan dalam membangun ekosistem kewirausahaan sosial adalah adanya komitmen yang kuat dan luhur untuk mencapai tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implikasinya, menurut Saragih, para pelaku wirausahawan sosial harus membekali diri dengan berbagai strategi dan keterampilan, termasuk dengan memanfaatkan keberadaan flatform social media.

Secara substansial pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial merupakan *tools* atau alat yang sangat penting dalam konteks pengembangan komunitas dalam aspek

peningkatan ekonomi. Pengembangan kewirausahaan sosial yang berpangkal tolak pada pentingnya inovasi dan kolaborasi dapat dipandang sebagai upaya mencari jalan ketiga dalam menyelesaikan berbagai masalah social ekonomi yang diakibatkan oleh mewabahnya pandemi korona yang masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Dalam perjalanannya, penerapan kewriausahaan social ini dapat dilihat sebagai satu bentuk tanggung jawab sosial yang dibingkai oleh nilai-nilai luhur moral yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial.

Pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan sosial dianggap sebagai jalan alternative untuk pengembangan lokal dan regional yang berkelanjutan. Kim dan Lim (2017) menyatakan bahwa perusahaan sosial dapat menjadi katalisator bagi pembangunan lokal berkelanjutan dengan efek positifnya yang dapat memengaruhi pembangunan lokal dan regional dan mampu memenuhi kebutuhan lokal tersebut, juga menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat, dan lebih jauh dapat mengembangkan aset relasional dalam proses bisnis, dan memulihkan solidaritas komunitas. Perusahaan-perusahaan sosial ini secara tidak langsung mampu mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh penduduk setempat.

Gambar di bawah ini menjelaskan spektrum kewirausahaan sosial sebagai basis dalam pengembangan ekonomi umat.



Sumber: (Jones 2015)

Pengalaman manusia pada dasarnya bersifat multidimensi, dan karenanya proses pengembangan kesejahteraan masyarakat pun harus mencerminkan hal demikian (Ife, 2002; Ife & Tesoriero, 2006). Secara teori, ada enam dimensi pengembangan masyarakat yang harus dipertimbangkan. Dimensi ini di antaranya; pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan budaya, pembangunan lingkungan dan pembangunan spiritual. Dua dimensi yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah pengembangan social dan ekonomi.

Secara teoritik, pengembangan sosial melibatkan sejumlah aspek. Salah satunya adalah pengalaman yang sangat umum dalam pekerjaan masyarakat, yakni identifikasi kebutuhan masyarakat diikuti dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui pembentukan layanan masyarakat baru atau

melalui perluasan lembaga yang sudah ada untuk menyediakan layanan yang diperlukan. Contohnya adalah aksi masyarakat untuk mendirikan pusat penitipan anak, fasilitas rekreasi, peningkatan transportasi umum, layanan polisi, tempat perlindungan wanita atau fasilitas perawatan lansia. Kebutuhan tersebut dapat merupakan hasil dari penilaian kebutuhan atau mungkin hanya muncul dari persepsi orang, dari pengalaman keseharian mereka tentang layanan apa yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakatnya.

Namun, sementara hal ini merupakan kegiatan kerja masyarakat yang sangat umum, ini bukan satu-satunya aspek pengembangan sosial. Juga termasuk program yang bertujuan membantu orang untuk saling bertemu dan memperkuat ikatan masyarakat. Contohnya, termasuk skema sambutan untuk pendatang baru, membawa orang bersama-sama untuk piknik, festival, atau acara sosial lainnya, program kunjungan untuk orang-orang yang tinggal di rumah, atau membangun berbagai kegiatan pendidikan, rekreasi, atau apa pun untuk mendorong orang agar terlibat. Program semacam itu dapat dijalankan dari pusat komunitas atau dari komunitas lain seperti sekolah, pusat rekreasi atau gereja, masjid, sinagog atau kuil.

Tentu saja, ada batasan pada seberapa banyak ikatan masyarakat dapat 'dipalsukan' melalui program-program seperti itu, karena inisiatif tersebut pada akhirnya harus diambil oleh orang-orang itu sendiri dan bukan oleh pekerja masyarakat. Namun, tentu saja mungkin bagi pengembangan masyarakat untuk menyediakan ruang bagi koneksi antarpribadi tersebut untuk terjadi dan tumbuh dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan tidak mengancam, di mana orang dapat mencari orang lain dengan keamanan relatif.

Dorongan untuk berpartisipasi adalah fitur utama dari semua pengembangan masyarakat, tetapi sangat penting dalam pengembangan sosial, karena di luar partisipasi langsung orang dapat terhubung satu sama lain dan merasakan rasa memiliki. Ini mensyaratkan bahwa ada pendekatan luas untuk partisipasi. Ini berarti bahwa partisipasi perlu dinilai sebagai tujuan itu sendiri, bukan hanya sebagai sarana untuk tujuan lain. Bukan hanya karena tingkat partisipasi yang tinggi menghasilkan hasil yang 'lebih baik', tetapi tingkat partisipasi yang tinggi itu sendiri penting dan bahwa partisipasi dalam haknya sendiri bermanfaat, terlepas dari hasil apa yang mungkin dicapai atau mungkin tidak tercapai.

Banyak literatur tentang pengembangan sosial, menyandingkan pengembangan sosial dengan pengembangan ekonomi (Midgley 1997). Ini adalah hal penting agar pengembangan dipahami tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal dampak pada kehidupan masyarakat dan kebutuhan untuk pengembangan dalam aspek kehidupan nonekonomi. Meskipun ini merupakan koreksi yang diperlukan untuk rasionalisme ekonomi sebagaimana diterapkan pada pengembangan, ini juga memiliki efek mengkategorikan semua aspek nonekonomi kehidupan masyarakat dan keberadaan manusia di bawah istilah 'sosial'. Pengembangan sosial dipahami di sini dalam arti yang lebih sempit, seperti tentang 'sosial'; yaitu interaksi antarmanusia. Aspek pengembangan lainnya -budaya, politik, lingkungan dan spiritual- layak untuk dibahas dalam hak mereka sendiri

dan memiliki karakteristik mereka sendiri, yang cenderung hilang jika mereka semua dimasukkan dalam satu rubrik tunggal pengembangan sosial.

Sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya, pengembangan ekonomi sering dipandang sebagai satu-satunya, atau aspek terpenting, dari proses pengembangan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika ekonomi itu sehat, argumen itu melanjutkan, sisanya akan mengikuti, karena ekonomi yang kuat dan tingkat kemakmuran yang tinggi berarti bahwa orang akan dapat membeli hal-hal yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang penuh dan sehat. Pandangan semacam itu adalah karakteristik rasionalisme ekonomi atau fundamentalisme ekonomi, yang memandang ekonomi sebagai prioritas utama dalam kehidupan pribadi, nasional, dan internasional. Dalam pemerintahan, kebijakan ekonomi dipandang sebagai bidang kegiatan pemerintah yang paling penting dan portofolio ekonomi dianggap sebagai posisi paling penting dalam kabinet daripada kesehatan, pendidikan atau bahkan pertahanan.

Pandangan seperti itu juga dapat diterapkan pada pengembangan masyarakat. Bagi mereka yang terlibat dalam pengembangan ekonomi masyarakat melihat ini sebagai dasar dari komunitas yang sukses. Banyak komunitas yang paling diuntungkan secara ekonomi memiliki tingkat aktivitas budaya, koneksi sosial atau partisipasi warga yang rendah. Menilai konsumsi individu, yang menjadi ciri khas kapitalisme yang sukses, bertentangan dengan pengalaman komunitas yang kuat. Pengembangan ekonomi memang penting, tentu saja, tetapi hanya satu dimensi dari pengembangan masyarakat.

Pengembangan ekonomi masyarakat (Shragge, 2000) dapat diklasifikasikan ke dalam dua area luas: konservatif dan radikal. Pengembangan ekonomi masyarakat konservatif melibatkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dalam tatanan ekonomi yang ada, sementara pengembangan ekonomi masyarakat radikal melibatkan pembentukan sistem ekonomi yang mewakili alternatif asli. Dalam kategori sebelumnya disertakan berbagai upaya untuk membuat komunitas lebih kompetitif dan lebih menguntungkan. Ini umumnya melibatkan pencarian industri baru atau investasi eksternal, sehingga kegiatan ekonomi di masyarakat meningkat dan lebih banyak uang dihasilkan yang tetap ada di masyarakat.

Pendekatan pengembangan ekonomi masyarakat semacam itu tentu saja tergantung pada kesehatan ekonomi yang lebih luas. Ia berupaya menjadikan komunitas pemain yang lebih baik dalam perekonomian itu. Tetapi, jika ekonomi yang lebih luas menyengsarakan maka demikian pula basis ekonomi komunitas itu. Industri yang menarik mungkin tampak seperti ide yang bagus, tetapi selalu ada risiko industri itu terpaksa tutup atau pindah jika ada perlambatan ekonomi secara lebih umum atau dalam industri itu khususnya. Dan kadang-kadang industri hanya bisa tertarik dengan menawarkan konsesi besar seperti itu sehingga manfaat komunitas netto tetap dipertanyakan. Bagaimanapun, sebagian besar keuntungan dari industri itu tidak akan tetap berada di komunitas, tetapi akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham yang mungkin ada di belahan lain dunia.

Sebaliknya, pengembangan ekonomi masyarakat radikal berupaya membangun ekonomi lokal dalam beberapa bentuk yang kurang tergantung pada

kekuatan eksternal dan berkelanjutan secara lokal. Ini termasuk membangun industri lokal skala kecil dan juga membangun beberapa bentuk sistem ekonomi lokal, seperti sistem barter, skema transfer energi lokal atau sistem pertukaran dan perdagangan lokal, yang diperdagangkan di antara masyarakat lokal dan bisnis sehingga manfaat dari aktivitas ekonomi lokal tetap berada dalam komunitas itu sendiri (Kennedy & Kennedy 1995, Meeker-Lowry, 1996). Skema semacam itu memiliki keuntungan isolasi relatif dari ekonomi global yang semakin berubah-ubah dan membangun basis ekonomi komunitas yang kuat, bahkan bagi komunitas yang sebagian besar diabaikan oleh ekonomi global. Kapasitas untuk pengembangan masyarakat tidak hanya bereaksi terhadap arus masalah tetapi untuk merintis alternatif berkelanjutan.

## B. Riset Terdahulu

Terkait isu pentingnya pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial yang dapat menjadi basis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa hasil riset terdahulu yang dapat menjadi pijakan penelitian yang sedang dilakukan. *Pertama*, penelitian oleh Mandala Faldini (2017). Riset ini menitikberatkan pada isu kewirausahaan sosial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Menurut riset ini, gagasan tentang kewirausahaan sosial relatif belum menjadi ide public yang dibicarakan secara luas, sekalipun secara praktik sudah lama ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulan riset yang dilakukan Faldini menunjukkan bahwa tujuan utama dari para wirausahawan sosial adalah melayani keperluan paling dasar masyarakat, yang tentu saja berbeda dari wirausahawan tradisional yang orientasi utamanya, atau bahkan satu-satunya, adalah keuntungan material yang bersifat personal.

*Kedua*, riset yang dikerjakan oleh Anis Fitria (2017). Riset ini focus pada isu *social entrepreneurship* dalam perspektif *maqashid al-syariah*. Sebagaimana hasil penelitian pertama di atas, penelitian yang dilakukan Fitria ini juga menegaskan bahwa *social enterprises* atau kewirausahaan sosial pada dasarnya masih menjadi terminologi dan isu yang relatif baru di Indonesia, termasuk di kalangan para sarjana. Menurut penelitian Fitria, formula kewirausahaan sosial ini dapat diposisikan segai formula alternative atau jalan ketiga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sudut pandang *maqosid al-syariah*, *social entrepreneurship* merupakan model atau formula alternatif penyelesaian masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti khususnya masalah ekonomi di era pandemi ini..

*Ketiga*, penelitian yang dikerjakan Siti Najma (2016). Penelitian ini focus pada isu kewirausahaan sosial atau *social enterprises* dalam konteks atau sudut pandang ekonomi Islami. Riset ini menegaskan bahwa nilai luhur ajaran Islam tidak menghendaki agar pelaksanaan wirausaha yang tidak menerapkan moral atau etika sosial sekaligus tidak berpihak pada perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam tidak menghendaki praktik wirausaha yang hanya berorientasi tunggal pada keuntungan yang bersifat material dan personal dengan tiak mnegidahkan terwujudnya kepedulian social. Praktik wirasusaha harus menjadi bagian dari tanggung jawab sosial pada masyarakat luas.

Dengan demikian, menurut penelitian Najma ini, praktik wirausaha niscaya dibingkai oleh ajaran Islam yang lebih mengutamakan dimensi moralitas dan kemanusiaan.

*Keempat*, riset yang dikerjakan oleh Irma Paramita Sofia (2015). Penelitian ini fokus pada isu kewirausahaan sosial atau *social enterprise* sebagai gagasan inovasi sosial bagi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian ini, kewirausahaan sosial bisa menjadi inovasi sosial yang bermanfaat dalam memecahkan berbagai masalah sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi utama kewirausahaan sosial, bukan keuntungan yang bersifat material dan personal, melainkan dampak sosial dengan semakin meningkatnya level kesejahteraan masyarakat, secara ekonomi dan sosial.

*Kelima*, riset yang dikerjakan Ratna Widiastuti (2011). Riset ini focus pada isu tentang *Socio-entrepreneurship*. Penelitian ini menegaskan bahwa kewirausahaan sosial bertujuan mewujudkan tata nilai sosial bagi masyarakat yang bisa menjadi jalan keluar atas berbagai masalah sosial yang selama ini cenderung diabaikan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui model kewirausahaan sosial ini, level kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan dapat naik secara berarti.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih bersifat riset kepustakaan atau konseptual, penelitian ini akan mengungkap kajian empirik terkait model atau formula pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan sosial di era pandemi. Secara lebih jauh, riset ini akan menginvestigasi tentang strategi yang dilakukan oleh tiga institusi yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat dalam mengakses sumber-sumber modal, serta bagaimana formula yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia para pelaku kewirausahaan sosial di berbagai komunitas keagamaan yang berbeda. Secara akademik, hasil kajian ini akan memperkaya dan menawarkan pilihan formula pengembangan potensi ekonomi umat, khususnya yang bertumpu pada penguatan aspek kewirausahaan sosial. Secara praktis, hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai model empiris dalam pengembangan ekonomi umat yang bertumpu pada kewirausahaan sosial.

### C. Dinamika Pengembangan Masyarakat

Secara umum, istilah “pengembangan masyarakat” atau “*community development*” berkaitan dengan penggunaan berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat lokal, sebagai suatu kesatuan tindakan yang mengusahakan perpaduan antara bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat lokal yang terorganisasi. Pengertian pengembangan masyarakat yang lain merujuk pada makna di mana suatu masyarakat berusaha untuk menentukan berbagai kebutuhan atau berbagai tujuan, kemudian mengatur atau menyusun kebutuhan dan tujuan tersebut, lalu mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tersebut, serta melaksanakan berbagai tindakan untuk itu semua, dengan cara memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik kooperatif.

Istilah “masyarakat” yang digunakan dalam definisi ini menunjukkan kepada dua pengelompokan orang, yaitu (1) keseluruhan orang yang tinggal di suatu daerah geografis, seperti desa, kota atau daerah, (2) kelompok-kelompok orang yang mempunyai minat-minat atau fungsi-fungsi yang sama, misalnya di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, agama dan lain sebagainya.

Istilah ‘*Community*’ pada umumnya dipandang sebagai ‘sesuatu yang bagus’. Sebagai sesuatu yang bernilai atau sangat diinginkan. Meskipun bisa ada keraguan bahwa *community* bisa saja atau dapat memberikan penekanan, pandangan negatif ini biasanya tidak sebanding dengan hal baik yang dihasilkan dari kata ‘*community*’ itu sendiri. Bagian ini berhubungan dengan nostalgia pada masa lalu yang dirasakan harus lebih bermakna dibandingkan pengalaman masa kini, seperti halnya saat melihat yang digambarkan dalam indahnya kostum pada tayangan TV drama tentang kehidupan desa atau mendengar dalam kenang-kenangan yang diceritakan oleh para orang tua.

Kemunculan kata ‘*community*’ ini mengungkapkan reaksi terhadap ancaman yang dirasakan dan kekosongan hidup pada masa kini dan keinginan untuk mendapatkan kepastian dan keamanan yang dibayangkan telah terwujud di masa lalu. Idealisme masa lalu ini tentu saja jauh dari kenyataan. Kehidupan di desa itu tidak selalu bersahabat, saling menyayangi, kekeluargaan dan keramah-tamahan. Bagi banyak orang, hal ini seperti kerja keras yang tampaknya tak berujung dan sedikit penghargaan dan ketidakamanan yang terus-menerus. Orang-orang yang selalu mengandalkan pada cuaca, tuan-tuan feodal atau para ahli dan tentara yang menyatakan hak untuk mendapatkan makanan dan kesenangan pada saat mereka berharap (Samuel, 1975).

Meskipun demikian, visi dan harapan yang dinyatakan pada idealnya istilah ‘*community*’ masih tetap kuat. Hilangnya makna ‘*community*’ telah membawa manfaat untuk industrialisasi, mobilitas dan kekayaan pada tingkat di luar mimpi-mimpi dari warga desa tadi, tapi dalam pikiran modern manfaat ini dibeli dan telah kehilangan sesuatu yang bernilai dalam hal hubungan personal, tanggung jawab kolektif dan kohesi sosial. Kekosongan yang dirasakan dan hilangnya makna dalam kehidupan industri modern atau pasca-industri telah mengakibatkan kerinduan untuk sesuatu yang, sebagian besar khayalan, namun hal ini tetap menjadi visi dan motivasi yang kuat (Bauman, 2001). Pasti ada perasaan bahwa sesuatu yang disebut ‘*community*’ telah hilang dan hal ini menunjukkan bahwa kita lebih miskin.

Adanya ide atas hilangnya *community* telah menjadi tema yang berulang-ulang dalam sosiologi pada abad ke 20 ini. Tokoh klasik Sosiologi, terutama Tonnies (1955) dan Durkheim (1933), melewati banyak kesulitan untuk melacak adanya penurunan komunitas tradisional dan penggantinya oleh bentuk yang lebih atomised, individualistis dan masyarakat yang dangkal (dalam istilah Tonnies, *fromgemeinschaft gessellschaft* atau, Durkheim, dari *mechanical solidarity* untuk *organic solidarity*).

Rasa dari kehilangan sesuatu yang berharga yang disebut ‘*community*’, telah menyebabkan penggunaan tanpa pandang bulu untuk memberikan dampak positif: misalnya di ‘komunitas kesehatan mental’, ‘*community corrections*’ dan

'pelayanan masyarakat'. Pemerintah, politisi dan para pengiklan sangat memahami kekuatan kata dan menggunakannya yang sesuai, sering kali dengan sedikit makna yang substantif dan di luar faktor *feel good* (Bryson Mowbray, 1981; Craig, 2007).

Kata '*community*' telah memiliki makna lebih dari ini. Salah satu makna yang terkait dengan itu adalah gagasan kolektif. *Community* berarti orang-orang yang bertindak bersama-sama dalam beberapa cara sebagai sebuah kelompok. Sebuah '*Community*' tidak hanya berarti sebuah kumpulan dari individu-individu; individu tersebut merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang memiliki makna untuk diri mereka sendiri dan yang lainnya. Adanya ide dalam menghargai kolektif ini tidak sejalan dengan para dominan individualisme post-industrial, masyarakat kapitalis modern, namun hal tersebut memiliki peran penting sepanjang sejarah pengalaman manusia maupun di semua budaya.

Dalam hal ini, masyarakat akan menjadi kapitalis modern post-industrial adalah pengecualian daripada aturan. Kesadaran kolektif, pemahaman kolektif, pengalaman kolektif maupun aksi kolektif adalah sangat penting dalam peradaban masyarakat. Mungkin itu adalah pemahaman dari sekumpulan yang berbeda dari individu-individu yang merupakan inti dari nostalgia yang ingin mengulang kembali idealismenya dari masyarakat di masa lalu.

Namun, *community* sendiri adalah jelas lebih dari sekadar kolektif. Pada dasarnya, dalam pemahaman kebanyakan masyarakat, beberapa ide dari keanggotaan masyarakat (Bauman, 2001). Ide keanggotaan ini sangat penting. Keanggotaan menyiratkan bukan hanya status tertentu tetapi juga hak-hak, hak istimewa dan tanggung jawab, dan beberapa tujuan bersama. Pada umumnya, untuk menjadi anggota organisasi kita harus menyepakati maksud dan tujuan dari organisasi itu, agar kita tidak mekerja menyalahi tujuan organisasi tersebut, dan biasanya itu dilakukan untuk menjaga nama baik organisasi.

Tersirat seberapa jauh komitmen dan kesungguhan untuk memberikan kontribusi melalui berbagai cara drmi memajukan tujuan organisasi. Bahwa frase 'anggota *community*' begitu mudahnya untuk diterima, hal ini menunjukkan bahwa gagasan keanggotaan dalam *community* menjadi bagian penting dari sebuah konstruksi *community*. Dengan keanggotaan maka timbulah rasa kepemilikan, dan ini tampaknya menjadi komponen penting dari *community*. Seringkali, ketika orang berbicara tentang perlunya *community* mereka akan mengutip pentingnya rasa kepemilikan; dari tempat di mana kita diakui dan termasuk bagian dari *community* (Ife, 2002). Aspek-aspek keanggotaan ini sangat penting jika kita ingin memahami makna simbolis *community* dalam masyarakat kontemporer.

Asosiasi umum yang lainnya dari kata '*community*' adalah sebuah ide dari '*human scale*'. Pengalaman ketika '*community*' dipandang sebagai koreksi untuk keterasingan dan atomisasi dari struktur berskala besar dan impersonal masyarakat modern. Masyarakat tampaknya tidak hanya terlalu besar dan terlalu impersonal dan tampaknya pula cukup sebanding dalam gagasan tentang sesuatu pada skala yang lebih manusiawi. Meskipun jelas imperatif ekonomi untuk hal-hal yang terjadi pada skala besar, frase 'kecil itu indah', diciptakan oleh E.F. Schumacher pada tahun 1970 (Schumacher, 1973), terus-menerus bergema. Manusia, setelah semua, berevolusi sebagai hunter-gatherer, dan hal itu dapat dikatakan bahwa

kelompok kecil diperlukan untuk gaya hidup hunter-gatherer yang merupakan bentuk paling 'alami' dari interaksi sosial manusia (Diamond, 1998).

Meskipun itu akan menjadi suatu kesalahan untuk mengejar sesuatu seperti biologis determinisme itu terlalu jauh, ini dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil, Apakah didasarkan pada kelompok suku atau pada keluarga besar, bahwa orang telah mendefinisikan dan menyadari bahwa kemanusiaan mereka terjadi sepanjang sejarah manusia. Masyarakat industri yang besar pada abad terakhir ini atau bahkan lebih (terutamanya yang terjadi di dunia Barat) mewakili pengecualian dari pada norma. Kegigihan atas harapan untuk hal-hal yang terjadi akan lebih mudah dikelola, secara personal dan *human scale* adalah alasan yang kuat untuk kegigihan masyarakat sebagai sebuah hal yang ideal, dan ini merupakan bentuk penting dari pembangunan masyarakat secara umum.

Gagasan tentang *community*, oleh karena itu, memiliki asosiasi tertentu, seperti kolektifitas, hak-hak yang saling menguntungkan dan tanggung jawab, keanggotaan dan kepemilikan dan *human scale* -yang umumnya dipandang berkurang dalam konteks modern (atau postmodern) industri (atau masyarakat pasca-industri) tetapi memiliki nilai yang positif. Namun, ada beberapa isu lainnya yang terkait dengan *community* bahkan menjadi lebih kontroversial.

Salah satu isu yang akan dieksplorasi secara lebih rinci dalam bagian berikutnya adalah sifat multidimensi *community*, yang pasti telah menyebabkan beberapa aktivis pengembangan masyarakat untuk berkonsentrasi pada beberapa dimensi *community* dengan mengesampingkan yang lain. Mungkin paling terkenal dalam hal ini adalah para pendukung dari pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara pembangunan ekonomi jelas penting, kadang-kadang ada kecenderungan untuk pekerja pembangunan ekonomi masyarakat untuk berasumsi bahwa, asalkan ekonomi masyarakat kuat, entah bagaimana caranya, yang lainnya akan berjalan baik. Ini adalah bentuk nyata dari ekonomi fundamentalisme, cukup familiar dengan sistem kerja kapitalisme global yang mengesampingkan aspek lain seperti pengalaman kemanusiaan dan masyarakat.

Gagasan tentang *human community*, jika harus memiliki nilai, harus mencerminkan aspek yang berbeda dari pengalaman manusia. Untuk berkonsentrasi pada salah satu pengecualian yang lain adalah dengan mengecilkan *community* untuk pengalaman yang diluar dimensi. Hal ini telah lama menjadi keumuman yang menggambarkan perbedaan antara komunitas berdasarkan geografis, diartikan dalam istilah lebih spesifik yaitu lokasi geografis, dan komunitas fungsional, di mana ada beberapa dasar nongeografis untuk didefinisikan. Contohnya komunitas, komunitas warga Italia, komunitas umat kristen, komunitas pebisnis (Ife, 2002). Dalam masyarakat pascaindustri atau industri yang kompleks, masyarakat fungsional mungkin lebih penting bagi banyak orang dari pada bagi masyarakat yang didasarkan lokasi seperti kota, desa, pinggiran, atau wilayah. Masyarakat fungsional yang kuat telah terbentuk oleh adanya mobilitas yang relatif mudah; orang-orang yang tidak lagi terbatas pada wilayah geografis yang tunggal tetapi dapat melakukan perjalanan untuk bertemu orang lain dengan minat dan ketertarikan yang sama.

Seperti halnya kata '*community*', kata '*development*' mempunyai konotasi positif, meskipun dua kata ini sering diimbangi oleh reputasi buruk dari banyaknya '*development projects*' dan persepsi yang merusak yang mengatasnamakan '*development*', terutama pada apa yang disebut '*developing*'. Namun, kritik-kritik ini umumnya tidak mencerminkan pada nilai positif *development*; sebaliknya mereka menyarankan bahwa cara pembangunan itu dijalankan telah menjadikannya cacat. Kritik-kritik tersebut biasanya disertai advokasi melalui beberapa pola alternatif pembangunan, seperti 'pembangunan yang berkelanjutan', 'pembangunan yang sesuai konteks', 'pembangunan yang berpusat pada masyarakat', 'pembangunan berbasis skala manusia' dan 'pembangunan menyeluruh' (Hartwick, 2009).

Tampaknya, ide pembangunan hampir dihargai secara universal, meskipun cara bagaimana pembangunan tersebut diimplementasikan mendapatkan kritik secara luas. Namun, kritik terhadap pola pembangunan telah menunjukkan bahwa pembangunan itu sendiri tidak cukup membawa hasil yang diinginkan. Cara bagaimana pembangunan dilaksanakan itu sangat penting, dan dalam pengertian ini ada kesamaan dengan makna *community*. Kata '*community*' juga dapat memiliki manifestasinya yang negatif, meskipun pada umumnya memiliki konotasi yang positif.

Salah satu dimensi kunci dari pembangunan adalah perbedaan antara *top-down development* *bottom-up development* (Ife, 2002). *Top-down development* adalah pembangunan yang diarahkan oleh 'ahli': mereka yang memiliki keunggulan dan kebijaksanaan, pengetahuan dan keahlian, memiliki ide-ide yang jelas tentang bagaimana pengembangan seharusnya untuk keberlanjutan dan mereka yang berusaha untuk mengimplementasikan program-program yang sesuai dengan konteks, di mana 'ahli' berasal dari tradisi budaya atau nasional yang mana berbeda dari masyarakat, *top-down development* pada dasarnya merupakan kolonialis di mana ahli eksternal yang mengetahui apa yang terbaik dan berusaha untuk memaksakan pandangan dunia mereka pada orang lain. Namun, *top-down development* juga dapat dijalankan dari dalam negara atau budaya; dalam hal ini 'ahli' mungkin berasal dari sebuah badan pemerintah atau LSM yang diasumsikan memiliki keunggulan dan kebijaksanaan untuk mereka supaya menjadi 'berkembang'. *Top-down development* tersebut adalah berbeda dengan tradisi *bottom-up*, yang mengakui kebijaksanaan dan keahlian berada pada masyarakat dan berusaha untuk mencari dan memvalidasi bahwa kebijaksanaan dan penyediaan sumber daya berdasarkan waktunya dan arah pembangunan dapat diarahkan oleh mereka yang paling terpengaruh.

Pembangunan atau pengembangan masyarakat merupakan suatu metode, karena dipandang sebagai suatu cara atau kerja untuk mencapai berbagai tujuan masyarakat yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini dapat meliputi pendidikan orang dewasa pelayanan kesejahteraan sosial atau pelayanan kesehatan masyarakat. Pengembangan masyarakat juga dipandang sebagai suatu program.

Sebagai suatu gerakan, pengembangan masyarakat dapat dipandang sebagai suatu media pelembagaan, pengembangan struktur organisasi, penerimaan prosedur, peningkatan kemampuan profesional para praktisi pengembangan

masyarakat desa. Sebagai suatu gerakan, pengembangan masyarakat dirancang untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui partisipasi aktif mereka (jika mungkin atas dasar prakarsa mereka sendiri). Namun, jika prakarsa ini tidak muncul secara spontan, maka dapat dilakukan berbagai teknik untuk menimbulkan dan merangsang tanggapan yang aktif dan positif bagi gerakan tersebut.

Secara demikian, unsur pokok pengembangan masyarakat adalah perencanaan dan pengintegrasian masyarakat. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan, menemukan dan memperjelas arti suatu masalah, mengungkapkan hakekat dan ruang lingkup masalah, mempertimbangkan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulangan masalah, serta mengadakan kegiatan yang sesuai dengan upaya yang telah dipilih. Unsur kedua adalah pengintegrasian masyarakat, yaitu suatu proses penerapan sikap dan praktik kerja sama yang menghasilkan berbagai peningkatan dalam hal: Identifikasi masyarakat secara keseluruhan, minat dan partisipasi dalam urusan masyarakat, dan saling menukar nilai dan sarana.

#### D. Model Pengembangan Masyarakat

Max Weber (Parson, 1976) di dalam metodologinya beranggapan bahwa semua proporsi keilmuan, khususnya ilmu-ilmu sosial pada dasarnya berhubungan dengan nilai. Weber tentu saja tidak bermaksud untuk menunjukkan secara khusus proporsi-proporsi yang berkaitan dengan masalah obangunan masyarakat desa, karena bidang studi tersebut belum menjadi pengkajian pada jamannya. Walaupun demikian, tidak seorang pun menyangkal bahwa studi pengembangan masyarakat desa merupakan salah satu pengkajian ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan nilai. Oleh karena itu, model-model dan strategi pengembangan masyarakat telah berkembang sedemikian rupa dengan didasarkan atas pilihan-pilihan yang bersifat filosofis dan idiologis. Blakely memang pernah mengatakan bahwa keaneka ragaman strategi pengembangan masyarakat sebagai disebabkan karena kurang adanya “disciplinary core” yang bersifat tunggal (Blakely, 1980). Adanya keanekaragaman orientasi filosofi, idiologis atau paradigmatis merupakan penyebab paling utama timbulnya berbagai macam strategi pengembangan masyarakat.

Model-model pengembangan masyarakat yang cukup terkenal, antara lain: *Pertama, the empiricorational the normative-reeducative* dan *the power coersive* dari Chin dan Benne. *Kedua, the profesional-technical, the political* dan *the countercultural* dari Croufoot dan Chesler. *Ketiga, The self-help, the technical assistance* dan *the conflict* dari Christenson dan Robinson. *Keempat, the locality development, the social planning* dan *the social action* dari Jack Rothman.

Dalam pembahasan model pengembangan masyarakat di sini, akan dibahas mengenai model yang diberikan oleh Jack Rothman (1974), karena model tersebut merupakan salah satu bidang studi yang penting di dalam kurikulum *the Council on Social Work Education* atau merupakan salah satu mata kuliah yang penting dan yang banyak diajarkan di sekolah-sekolah pekerjaan sosial di dunia, baik dinegara maju maupun negara sedang berkembang.

Rothman (1974) memperkenalkan tiga model pengembangan masyarakat, yaitu: *Locality development*, *Social Planning*, dan *social action*. *Locality development* menekankan adanya perubahan masyarakat yang efektif, sesuai dengan tujuan dan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan bersama. *Community development* di sini diartikan sebagai suatu proses yang telah ditentukan atau di polakan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi melalui partisipasi aktif mereka.

Pengembangan masyarakat model *locality development* mencakup pengembangan prosedural yang demokratis, kerja sama di antara masyarakat secara sukarela, menolong diri mereka sendiri (*self-help*), mengembangkan kepemimpinan warga masyarakat setempat serta peningkatan pendidikan.

Pengembangan masyarakat model *social planning* menekankan adanya suatu proses teknik pemecahan masalah-masalah sosial, seperti masalah kenakalan remaja, perumahan atau kesehatan mental. Perundingan secara rasional serta perubahan yang terkontrol merupakan pusat model pengembangan ini. Partisipasi warga masyarakat lebih sedikit dan tergantung pada masalah-masalah yang dialami saat ini organisasi-organisasi apa yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pendekatan ini berasumsi bahwa perubahan sosial merupakan suatu lingkungan industri yang kompleks yang memerlukan seorang ahli untuk melakukan perubahan melalui latihan-latihan manipulasi organisasi-organisasi birokratis yang luas. Para perencana biasanya dari profesi pekerjaan sosial, karena berhubungan dengan penyediaan serta pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat atau penyebar luasan usaha perubahan sosial secara fundamental bukan merupakan pusat perhatian model ini.

Pengembangan masyarakat model *social action* ditunjukan bagi sebagian masyarakat atau populasi yang tidak beruntung, namun yang membubuhkan pengorganisasian dan barangkali sebagai analisa dengan yang lainnya untuk mengajukan permintaan-permintaan tuntutan-tuntutan masyarakat luas tentang sumber-sumber agar meningkat atau kondisi mereka tersembuhkan sehingga sesuai dengan standar demokrasi atau keadilan sosial. Dalam hal ini para praktikan (pekerja sosial) bertujuan mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga utama atau praktik-praktik masyarakat secara mendasar. Mereka memelihara redistribusi kekuatan, sumber-sumber atau pembuatan kebijakan masyarakat atau mengadakan perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan yang mendasar pada organisasi-organisasi formal.

Rothman membedakan ketiga model tersebut melalui duabelas variabel, yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel  
Model-model Pengembangan Masyarakat

No	Variabel	Locality Development	Social Planning	Social Action
1	Kategori-kategori tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolong diri sendiri;</li> <li>• Integrasi</li> </ul>	Pemecahan masalah dengan memusatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kekuatan sumber-</li> </ul>

	masyarakat	dan kemampuan masyarakat (Tujuan-tujuan proses)	perhatian pada masalah masyarakat yang hakiki (Tujuan tugas)	sumber dan relationship <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan perubahan kelembagaan secara menasar (tujuan proses dan tujuan tugas)</li> </ul>
2	Asumsi-asumsi yang menyangkut kondisi masalah dan struktur masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang simpang siur karena percampuran nilai (epilised)</li> <li>• Anomi</li> <li>• Kurangnya sifat demokratis dan relationship di dalam usaha pemecahan masalah</li> <li>• Masyarakat tradisional statis</li> </ul>	Masalah-masalah sosialnya hakiki (substantif) seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masalah kesehatan fisik dan mental</li> <li>• Masalah perumahan</li> <li>• Masalah rekreasi</li> <li>• Dan sebagainya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya produk-produk yang tidak beruntung/dirugikan</li> <li>• Ketidakadilan sosial</li> <li>• Depresi</li> <li>• Ketimpangan</li> </ul>
3	Dasar Strategi Perubahan	Melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menentukan dan memecahkan masalah-masalah mereka yang mereka rasakan	Menghantarkan kenyataan permasalahan dan memutuskannya secara lebih rasional dalam tindakan	Mwngkristalisasikan isu-isu orang dan mengorganisasikannya untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan guna melawan target musuh
4	Karakteristik teknik dan teknik perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsensus: komunikasi diantara kelompok-kelompok masyarakat dan</li> </ul>	Konsesnsus atau konflik	Konflik atau kontes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfrontasi</li> <li>• Aksi langsung (terjun langsung ke jalan)</li> </ul>

		kelompok-kelompok yang berminat <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi kelompok</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• negosiasi</li> </ul>
5	Peranan-peranan Pekerja Sosial (Praktikum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enabler-katalisator</li> <li>• Katalisator</li> <li>• Guru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencari dan penganalisis data</li> <li>• Pelaksana program</li> <li>• Fasilitator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivist-advocate</li> <li>• Agitator</li> <li>• Broker (makelar)</li> <li>• Negosiator</li> </ul>
6	Media perubahan	Manipulasi ttugas-tugas yang ringan untuk diorientasikan kepada kelompok	Memanipulasi organisasi-organisasi formal dan data	Memanipulasi organisasi-organisasi masa dan proses politik
7	Orientasi terhadap kekuatan struktur	Anggota-anggota dari struktur yang kuat sebagai kolaborator di dalam suatu usaha (venture) / spekulasi bersama	Struktur yang kuat terletak pada tenaga kerja/pekerja (employer) dan sponsor-sponsor	Struktur yang kuat sebagai target eksternal untuk melakukan: Oppresor agar diterima atau diakui
8	Batasan definisi pada sistem klien yaitu asyarakat	Seluruh masyarakat secara geografis	Seluruh masyarakat atau sebagian masyarakat (mencakup fungsi masyarakat)	Sebagian/sekelompok masyarakat
9	Asumsi-asumsi yang memelihara a minat sebagian masyarakat	Minat-minat bersama atau perbedaan-perbedaan rekonsiabel	Minat-minat rekonsiabel atau konflik	Konflik minat-minat yang bukan merupakan rekonsiabel seperti: sumber-sumber yang jarang/sedikit
10	Konsepsi minat masyarakat	Menyatukan minat-minat masyarakat yang rasional (rationalist-uniatry)	Menyatukan minat-minat yang ideal (Idealist-uniatry)	Minatnya realistis individualis (realist individualist)
11	Konsepsi tentang	Warga masyarakat	Konsumen-konsumen	Korban-korban (victims)

	populasi klien		(Consumers)	
12	Konsep tentang peranan klien	Berpartisipasi di dalam interaksi proses pemecahan masalah	Pengkonsumsi atau penerima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai tenaga kerja/pekerja</li> <li>• Pemilih</li> <li>• Anggota</li> </ul>

Sumber: Iskandar (1998)

Pemisah model pengembangan masyarakat tersebut sebenarnya hanya merupakan pembatasan konseptual, karena di dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat banyak mendapat kesulitan-kesulitan untuk menerapkan model yang kita pilih secara murni, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dari pihak klien maupun pekerja sosialnya fasilitas yang ada maupun karena masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang bagian-bagiannya saling berinteraksi dan berinterdependensi, sehingga tidak atau sulit untuk di pisahkan.

Argumentasi pemilihan model *locality development* sebagai penekanan kegiatan pengujian dan demonstrasi intervensi pekerjaan sosial adalah sebagai berikut: *Pertama*, model *locality development* menekankan pentingnya kerjasama dan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan sistem nilai masyarakat pedesaan yang ada di Indonesia khususnya di daerah Jawa Barat, yaitu nilai akan kekeluargaan dan gotong royong di dalam mengatasi berbagai macam permasalahan-permasalahan dan usaha pemenuhan kebutuhan.

*Kedua*, model *locality development* juga menekankan usaha pencapaian tujuan pengembangan melalui kemampuan masyarakat itu sendiri sedang para ahlinya hanya memberikan informasi-informasi pengetahuan-pengetahuan dan keahliannya sehingga masyarakat akan menjadi tahu, paham, menghayati dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama. Jadi peranan seorang pekerja sosial di dalam model ini adalah sebagai enabler, katalisator, koordinator dan guru. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah di dalam pengembangan pedesaan yang juga menekankan perlunya pengembangan desa dengan kekuatannya sendiri baik modal, bahan, maupun tenaga ahlinya (pelaksanaannya). Pemerintah di sini hanya memberikan stimulan agar masyarakat dapat mengembangkannya dan memberikan dorongan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk sehingga akan tercipta kondisi yang dinamis untuk melaksanakan pengembangan daerahnya seväga berencana dan terus-menerus.

*Ketiga*, model *locality development* juga ditunjukkan untuk mengembangkan jalannya prosedur yang demokratis dengan melalui partisipasi pendapat untuk mendapatkan kesepakatan. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah agar masyarakat dapat mengeluarkan pendapat secara musyawarah dan menggunakan jalur-jalur konstitusional di dalam mencapai tujuannya. Pengembangan masyarakat model *locality development* melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi, berrelasi dan terintegrasi secara normatif, di mana tiap-tiap bagian memberikan sumbangan fungsional bagi tercapainya tujuan sistem (masyarakat keseluruhan).

Model *locality development* percaya bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial melakukan penyesuaian-penyesuaian secara sistematis melalui konsensus normatif dan sistem pengawasan sosial. Strategi *locality development* menggunakan strategi perubahan kemasyarakatan yang berdasarkan kepada partisipasi luas seluruh lapisan masyarakat di dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan tindakan dan evaluasi. Model *locality development* percaya bahwa perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal melalui partisipasi luas dari segenap lapisan masyarakat pada tingkat komunitas di dalam penentuan tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan, di mana prosedur-prosedur yang bersifat demokratis, kerjasam sukarela dan pengembangan pendidikan (tujuan pendidikan) memperoleh peranan yang sangat besar (Rothman, 1974:24).

Model ini juga percaya bahwa manusia pada prinsipnya mempunyai sifat kooperatif, rasional dan mampu mengendalikan diri, sehingga model ini menganjurkan pelaksanaan perusahaan kemasyarakatan melalui kekuatan diri sendiri dan partisipasi sukarela (Christensen dan Robinson, 1980; Batten, 1973). Di dalam kegiatan yang demikian pekerja sosial berusaha untuk membantu masyarakat menentukan alternatif-alternatif dan keputusan-keputusan bersama sehingga membantu masyarakat agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri. Untuk itu Rothman mengatakan peranan pekerja sosial di dalam model ini adalah sebagai seorang enabler, katalisator, koordinator dan edukator.

Peranan pekerja sosial di sini sangatlah essensial karena pengembangan masyarakat pedesaan memerlukan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan serta keahlian-keahlian baru dan sistem pembagian kerja yang terspesualisasi. Para pekerja sosial yang pada umumnya berasal dari luar masyarakat lokal (*outsider*) merupakan orang yang sangat potensial karena memiliki kemampuan untuk menyadari dan mengembangkan rasionalitasnya sehingga mereka mampu memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melepaskan diri dan stagnasi struktural.

#### E. Program Pengembangan Masyarakat

Tentu saja, kebanyakan program pengembangan masyarakat adalah campuran dari *top-down* dan *bottom-up*. Banyak proyek *top-down* mengakui pentingnya 'pemberdayaan' dan 'partisipasi' orang-orang yang bersangkutan, dan demikian pula banyak program *bottom-up* menggunakan ahli eksternal, terutama ketika ahli ini tidak tersedia dalam masyarakat. Beberapa program yang dianggap *bottom-up* yang pada kenyataannya sebagian *top-down*: mereka terbatas oleh manajemen dan persyaratan akuntabilitas, kepentingan untuk mengejar target, persyaratan donor, dan sebagainya. Dalam program tersebut, membicarakan 'pemberdayaan' dan 'penentuan nasib sendiri' sering kali hanya retorika kosong untuk menyamakan *top-down* dan sifat dasarnya kolonialis dan eksploitatif kegiatan pengembangan masyarakat, dan 'partisipasi' orang hanyalah bersifat konsultatif daripada keterlibatannya secara nyata.

Hal inilah yang menjadikan sebagian campuran dari *top-down* dan *bottom-up model* yang menjadikan 'development' memiliki konotasi yang buruk. Kebanyakan walaupun tidak semua kritik pengembangan ditujukan pada

pendekatan *top-down*, yang berusaha untuk menekankan masyarakat untuk memiliki pada pandangan terhadap orang lain tentang apa yang sesuai dengan perkembangan, sehingga dengan demikian mengesampingkan hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan melanggengkan struktur penindasan dan kerugian. Pengembangan masyarakat yang bersifat *Top-down* yang tidak tepat dan tidak demokratis inilah dapat dikatakan sebagai bentuk ekstrim dalam program neoliberal 'penyesuaian struktural' yang diterapkan oleh World Bank, IMF dan 'ahli' bidang ekonomi lainnya, sering meskipun harapan program berpusat pada kebutuhan masyarakat- namun yang terjadi mereka hanya bisa menerapkan dengan bantuan militer atau pasukan keamanan dan penyalahgunaan hak asasi manusia (Klein, 2007).

Sebaliknya, program pengembangan *bottom-up* kurang mendapatkan kritik. Kritik paling jelas terkait program pengembangan *bottom-up* adalah bahwa hal itu dapat tampak serampangan dan dalam skala yang kecil karena cenderung menitikberatkan pada proses daripada menitikberatkan pada outcome, dan karenanya cenderung tidak memberikan hasil yang jelas, pendekatan ini dikenal lebih banyak disukai oleh manajer. Hal ini juga cenderung untuk tidak tepat untuk masuk ke dalam penentuan periode waktu/durasi yang telah ditetapkan oleh donor. *Participatory democracy* dapat menjadi kacau dan memakan banyak waktu, dan dari dalam kerangka modernitas tampak tidak efisien dan tidak terpercaya. Namun, pendekatan pengembangan *bottom-up* yang sesungguhnya cenderung tidak menarik kritik secara politik seperti halnya pendekatan *top-down*.

Masalah dari program pengembangan akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Hal ini sangat penting kepada pemahaman *community development*, dan juga memiliki implikasi penting dari perspektif hak asasi manusia. Ini dapat menjadi argumentasi bahwa salah satu alasan mengapa hak asasi manusia sering kali kurang efektif adalah dikarenakan pendekatan yang digunakan cenderung mengadopsi *top-down*, secara legal, dikendalikan oleh pendekatan itu sendiri daripada perspektif *bottom-up*, dan bahwa jika kita ingin mengambil pendekatan CD -menyiratkan pentingnya pendekatan *bottom-up*- hak asasi manusia, dalam teori dan praktik, akan dilemparkan dalam sisi yang agak berbeda.

Isu penting lainnya dalam membahas ide program pengembangan adalah hubungan antara pengembangan dan pertumbuhan. Sering kali, terutama dalam ekonomi, keduanya digunakan secara bergantian, seolah-olah 'pengembangan' adalah kata lain hanya untuk pertumbuhan, atau seolah-olah pencapaian pertumbuhan menyiratkan bahwa pengembangan juga telah dicapai. Hal ini merupakan konsekuensi dari ekonomi rasionalisme atau ekonomi fundamentalisme: ketika segalanya terlihat murni dalam hal ekonomi, pertumbuhan ekonomi harus, secara definisi, hal yang baik, dan jadi pertumbuhan menjadi kriteria mudah terukur untuk menentukan sukses 'pengembangan'. Memang, dari perspektif ini, pengembangan tidak mungkin tanpa pertumbuhan. Dari sisi *world view* ini sangat mudah untuk menganggap bahwa pertumbuhan sama dengan pengembangan, dan dengan demikian mengabaikan perbedaan penting makna antara 'pertumbuhan' dan 'pengembangan' (Daly, 1997).

Penggabungan 'pertumbuhan' dan 'pengembangan' sangat bermasalah pada saat ekologi imperatif memerlukan untuk kembali mempertimbangkan hal sebelumnya terkait pertumbuhan, dan untuk mengenali bahwa ada batas-batas yang diperlukan untuk pertumbuhan dalam dunia yang terbatas (Meadows *et al.*, 2004). Terlalu banyak pertumbuhan menghasilkan hal yang negatif daripada konsekuensi positif. Hal ini jelas terlihat dalam dampak dari pemanasan global, pengambilan ikan yang berlebihan, dan peningkatan pencemaran laut, krisis dalam pasokan air bersih, krisis yang akan datang dari ketersediaan minyak, penghancuran hutan belantara dan kepunahan spesies.

Oleh karena itu menjadi penting bahwa ide pengembangan akan terlepas dari gagasan tentang pertumbuhan, dan kita perlu bertanya bagaimana pengembangan dapat dilanjutkan tanpa pertumbuhan (Daly, 1997; McKibben, 2008; Shiva, 2005). Jelas ini adalah dua hal yang berbeda. Dalam siklus kehidupan manusia, misalnya, hanya terjadi pertumbuhan selama dua dekade pertama kehidupan, tapi pengembangan (termasuk intelektual, sosial, moral dan budaya) dapat melanjutkan sampai hari kematian kita. Pertumbuhan dapat disamakan dengan perubahan kuantitatif-hanya semakin besar; Sedangkan pengembangan menyiratkan perubahan kualitatif – mendapatkan lebih baik-yang dapat menjadi bertransformasi atau diperbaharui. Sementara pertumbuhan dan perkembangan dapat di jalankan secara bersama-sama, hal ini tidak diperlukan atau menyambung secara universal. Kadang-kadang, yang lebih besar lebih baik, tetapi di lain waktu yang kecil lebih indah. Memang, seperti yang ditunjukkan di atas, kepentingan dalam 'komunitas' mewakili sebagian reaksi terhadap konsekuensi negatif pertumbuhan ketika komunitas kecil digantikan oleh skala besar 'masyarakat'. Pengembangan dan komunitas dijalankan bersama-sama dengan cara pertumbuhan dan masyarakat tidak berjalan bersamaan.

#### F. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Sebuah variasi pada 'pengembangan masyarakat' yang populer sejak 1990-an adalah 'membangun kapasitas masyarakat'. Istilah ini telah diadopsi dalam kaitannya khususnya untuk proyek-proyek *international development*. Idenya adalah bahwa proses development dimaksudkan untuk 'membangun kapasitas' sehingga masyarakat dapat lebih mampu untuk mencapai tujuan (James, 2001; Plummer, 2000; Smillie 2001). Namun, dalam sisi bahasa juga terjadi perubahan makna (Craig, 2007). Kata 'kapasitas' membawa gambaran tentang apa yang seharusnya untuk diselesaikan oleh masyarakat. Hasil secara implisit didefinisikan: Peran dari pekerja dalam komunitas adalah kemudian untuk membantu membangun 'kapasitas' untuk dicapai.

Tanpa beberapa gagasan implisit dari gagasan tentang 'kapasitas' itu akan menjadi tidak berarti apa-apa, seperti halnya setiap komunitas memiliki kapasitas dalam banyak hal yang berbeda, termasuk *self destruction*, perlindungan perbatasan eksklusif, fragmentasi, rasisme, kekerasan dan penindasan minoritas; mungkin ini adalah tidak termasuk 'kapasitas' yang dimaksudkan untuk 'dibangun'. Asumsi implisit dari outcome ini bertentangan dengan gagasan tentang pengembangan masyarakat. Meskipun adanya retorika yang sering dikaitkan

dengan peningkatan kapasitas masyarakat, hal ini akan terlalu mudah menyebabkan defisit pendekatan untuk masyarakat, yang berkonsentrasi pada kelemahan atau defisit komunitas-mana 'kapasitas' yang kurang-sebagai penentangan dari perspektif kekuatan yang berusaha untuk membangun kekuatan yang hadir dalam setiap masyarakat (Mc Cashen, 2004).

Gerakan yang terbaru adalah 'kewirausahaan sosial' (Bornstein, 2004; Nicholls, 2006) telah mengakibatkan reformulasi dari pengembangan masyarakat yang menggunakan perbendaharaan kata dari perusahaan swasta, mengadopsi serangkaian ide-ide tentang cara kerja yang sangat berbeda, dan yang bertumpu pada nilai dasar yang berbeda. Meskipun mungkin ada beberapa kesamaan antara pengembangan masyarakat pekerja dan pengusaha, seperti kreativitas, fleksibilitas dan komitmen, tujuan dari keduanya tidak sama. Pengusaha tujuannya untuk mengejar uang dan keuntungan individu, sementara pengembangan masyarakat tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat. Selebihnya Kewirausahaan Sosial didasarkan pada asumsi bahwa ide-ide dan keterampilan dari komunitas bisnis dapat bermanfaat dan diterapkan untuk pengembangan masyarakat dan orang-orang dari sektor swasta, atau setidaknya menggunakan model sektor swasta, dapat meningkatkan hasil untuk masyarakat. Untuk menggunakan kosakata yang salah dan menerapkannya ke yang lain adalah menyesatkan, membingungkan dan berpotensi berbahaya, dan dapat merusak inti pengembangan masyarakat.

Secara ringkas, bahasa itu sangat penting. Makna dari *capacity building*, *social entrepreneurship*, *community organising* dan *development*, hal ini dikarenakan dan disertai dengan asumsi-asumsi tertentu tentang dunia di mana hal-hal tersebut itu dipraktikkan (Craig, 2007). Untuk berganti dari bahasa masyarakat pengembangan masyarakat ke istilah-istilah lainnya, demikian melibatkan pergeseran halus secara bahasa, dan karenanya pandangan dunia, lebih konsisten dengan *outcome-driven* (program yang dikendalikan berdasarkan *outcome*), berurutan, pendekatan manajerial modernitas dan membawa dengan itu bahaya pengkhinatan beberapa karakteristik yang paling penting dari teori dan praktek pengembangan masyarakat sebagaimana dipahami dalam buku ini.

#### G. Mengubah Ketidakberdayaan dengan Pemberdayaan

Dalam praktik pengembangan masyarakat, praktisi dan organisasi memainkan banyak peran berbeda dalam perencanaan, implementasi, dan difusi gagasan dan proyek yang ingin mereka promosikan. Beberapa dari peran ini dapat berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, sementara yang lain dapat mengakibatkan ketidakberdayaan mereka. Dalam bagian ini, delapan peran yang biasa dimainkan dalam praktik pengembangan dijelaskan secara singkat melalui lensa pemberdayaan dan ketidakberdayaan. Empat dari peran ini dianggap sebagai 'tradisional' dan empat diidentifikasi sebagai alternatif. Diharapkan, bahwa pelaksanaan dari penjelasan beberapa peran umum yang dimainkan oleh para praktisi akan memungkinkan kita untuk melihat lebih dekat bagaimana dampak teori praktik dan, yang lebih penting, pada potensi praktik tersebut untuk benar-benar mencapai aspirasi teoritis mereka.

Pada satu sisi, pematangan bidang pengembangan masyarakat ini positif karena praktik pengembangan terbukti kritis dan terbuka terhadap perubahan. Namun, kenyataan yang tidak menguntungkan dari transformasi berkelanjutan ini adalah bahwa sebagian besar rasa sakit yang tumbuh dialami tidak hanya oleh para praktisi itu sendiri, tetapi juga oleh subyek dari percobaan pengembangan tersebut. Sementara, agen dan institusi mungkin menderita karena krisis, secara umum, adalah orang-orang yang harus 'dikembangkan' yang harus berurusan dengan konsekuensi yang lebih besar dari intervensi tersebut, apakah mereka menjadi lebih miskin, lebih kaya, lebih bahagia, lebih sedih, kurang tergantung, lebih tergantung, diberdayakan atau tidak diberdayakan. Ketika sebuah proyek salah, praktisi pengembangan memiliki pilihan untuk berhenti dari pekerjaannya dan pergi, tetapi subjek pengembangan tidak dapat pergi ke mana pun. Dia sudah di rumahnya dan harus menghadapi situasi seperti yang ketika ditinggalkan. Untuk alasan ini, sangat penting bagi praktisi pengembangan untuk sepenuhnya memahami implikasi dari peran yang mereka harus mainkan ketika berinteraksi dengan masyarakat, terutama dalam hal apa yang akan terjadi pada subyek proyek pengembangan tersebut setelah praktisi berpindah.

Sebagian dari masalahnya adalah bahwa ada sedikit kesepakatan umum tentang tindakan apa yang termasuk dalam definisi pengembangan masyarakat (Denise & Harris, 1990). Lembaga internasional, pemerintah federal, dan kelompok akar rumput semuanya mengklaim sebagai pendukung pengembangan masyarakat, tetapi bagi masing-masing praktisi ini memiliki makna yang sangat berbeda. Hasil dari ini adalah bahwa apa yang dilakukan atas nama pengembangan masyarakat tunduk pada visi praktisi mandiri atau lembaga praktik, yang ia gunakan sebagai rasionalisasi untuk terlibat dalam spektrum peran yang luas, banyak di antaranya jelas tidak menghasilkan pengembangan masyarakat sama sekali. Seperti yang dinyatakan Bhattacharyya dengan yakin bahwa, di sinilah letak masalahnya: 'Banyak yang menyebut diri mereka sebagai pengembang masyarakat mungkin dapat melakukannya karena bidang tersebut tidak dibingkai; jika dipagari, mereka akan berkewajiban untuk berpisah, atau berlatih kembali'.

Karena itu, sangat penting untuk tidak hanya mengadopsi pemahaman yang benar tidak hanya tentang apa itu pengembangan masyarakat, tetapi juga, apa yang seharusnya. Di mana di satu sisi, kita dapat mengambil satu langkah maju dengan merangkul definisi Bhattacharyya, tentang 'pengejaran solidaritas dan agensi' (Bhattacharyya, 2004:28), kita dapat mengambil langkah kedua dengan melihat secara dekat hubungan antara pengembangan masyarakat dan istilah lain yang disalahgunakan, yaitu pemberdayaan.

Terlepas dari kemasyhuran 'pemberdayaan' sebagai kata kunci melelahkan, kata ini terus menjadi sangat penting, tidak banyak meskipun terlalu sering digunakan, tetapi lebih dari itu. Karena kata-kata kunci sering berfungsi untuk memberi kesan kepada seluruh dunia bahwa organisasi pengembangan berada di jalur yang benar, sangat penting bagi para sarjana dan pengkritik pengembangan untuk terus berupaya memisahkan kata-kata ini agar dapat disatukan kembali. Dalam bidang pengembangan saat ini, istilah pemberdayaan dan pengembangan masyarakat saling terhubung dan karenanya perlu untuk memahami istilah-istilah

itu tidak hanya dengan mereka sendiri, tetapi juga dalam cara-cara berbeda yang saling terkait, baik melalui retorika belaka atau dalam praktik nyata. Craig (2002) mendefinisikan pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat sebagai penciptaan struktur, proses, dan mekanisme yang berkelanjutan, di mana masyarakat lokal memiliki peningkatan tingkat kontrol, dan dari mana mereka memiliki dampak yang terukur pada kebijakan publik dan sosial yang mempengaruhi komunitas-komunitas ini. Jika kita dapat menerima bahwa tujuan utama pengembangan masyarakat adalah untuk memberdayakan, maka semua peran yang dilakukan dalam kedok ini harus tunduk pada lensa pemberdayaan, serta kebalikannya, yaitu ketidakberdayaan.

## **BAGIAN 3 METODE PENELITIAN**

### **A. Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di tiga lembaga pengembangan ekonomi umat berbasis kewirausahaan sosial yang berlokasi di tiga provinsi kawasan Indonesia Timur. Yaitu, East Bali Cashews di Provinsi Bali, Du'Anyam di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Sidegon di Provinsi Maluku Utara. Ketiga lembaga pengembangan ekonomi umat berbasis kewirausahaan sosial ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah Indonesia Timur lebih membutuhkan perhatian dan upaya pengembangan ekonomi yang lebih kuat melihat standar ekonomi mereka yang relatif berada di bawah wilayah Indonesia Barat. Kedua, ketiga lembaga pengembangan ekonomi umat berbasis kewirausahaan sosial yang dipilih merepresentasikan keragaman keyakinan, sehingga menjadi menarik secara akademik untuk melihat implikasinya terhadap upaya pengembangan ekonomi umat di komunitas yang berbeda secara keyakinan. Penelitian ini secara fokus akan menginvestigasi strategi yang dilakukan oleh ketiga lembaga pengembangan ekonomi umat tadi dalam hal mengakses sumber-sumber permodalan, juga bagaimana strategi yang dilakukan oleh ketiga lembaga tadi dalam mengembangkan sumber daya pelaku ekonomi umat berbasis kewirausahaan sosial.

### **B. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian ini tentang pengembangan ekonomi umat berbasis kewirausahaan sosial di East Bali Cashews Provinsi Bali, Du'Anyam Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sidegon di Provinsi Maluku Utara. Adapun subyek dari penelitian ini adalah para pengelola lembaga pengembangan ekonomi umat, warga lokal yang terlibat sebagai pelaku ekonomi umat, serta *stakeholders* lainnya yang terkait dengan proses pengembangan ekonomi umat, baik pihak penyedia modal usaha maupun Dinas UKM yang ada di struktur Pemerintah Daerah.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan multikasus. Karena merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi multikasus, maka penelitian ini tidak bermaksud untuk melakukan generalisasi sebagaimana penelitian kuantitatif. Melalui metode ini akan terungkap berbagai problem yang menghambat dalam mengakses sumber-sumber modal usaha. Selain mengidentifikasi problem mendasar yang dihadapi terkait keterbatasan dalam mengakses sumber modal dan bagaimana strategi dalam mengatasinya, studi ini juga akan meneliti berbagai strategi yang dilakukan dalam mengembangkan kapasitas para pelaku ekonomi umat di masing-masing insttusi yang diteliti.

Metode ini dipakai untuk membedah fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Terdapat beberapa alasan mengapa metode ini yang dipakai dalam riset ini. *Pertama*, metode ini dipandang bisa mengurai fenomena pengembangan ekonomi masyarakat yang berpangkal pada kewirausahaan sosial. *Kedua*, metode ini bisa dipakai untuk pengumpulan data yang diperlukan sekaligus dapat merumuskan sejumlah langkah dan formula untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. *Ketiga*, untuk menguji validitas data digunakan uji kesahihan data melalui teknik triangulasi.

Pembahasan hasil penelitian direncanakan setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan. Data dalam penelitian ini digali melalui teknik wawancara mendalam, *focused group discussion*, observasi dan studi dokumentasi. Informan kunci ditetapkan dengan memenuhi kriteria yang untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki. Untuk menguji validitas data dan sumber data, digunakan teknik triangulasi. Data transkripsi yang diurai dari hasil diskusi terfokus dan wawancara mendalam dianalisis melalui pemberian tema, konseptualisasi pernyataan dan menginterpretasikannya ke dalam bentuk narasi. Pada praktiknya, penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data yang meliputi kajian pustaka, analisis deskriptif, wawancara mendalam, serta diskusi terfokus.

Teknik diskusi terfokus dan wawancara mendalam terutama dilakukan untuk menemukan gambaran yang holistik terkait strategi mengakses modal dan penguatan kapasitas para pelaku ekonomi umat yang umumnya adalah warga lokal. Diskusi terfokus terutama dipilih karena dapat memberikan kesempatan kepada para informan atau narasumber penelitian yang telah dipilih untuk saling berinteraksi mengungkapkan berbagai informasi yang tersembunyi, sekaligus memberikan wawasan dan opininya terkait masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi umat berbasis kewirausahaan sosial, sekaligus pada saat bersamaan dapat dilakukan wawancara dalam waktu yang terbatas.

Adapun instrumen yang dikembangkan pada penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data tentang strategi mengakses sumber-sumber permodalan dan penguatan kapasitas pelaku usaha ekonomi umat di tiga institusi yang menjadi obyek riset. Instrumen yang dibuat memotret secara jelas tentang kendala, usaha-usaha dan strategi dalam mengatasi kendala-kendala terkait keterbatasan dalam mengakses sumber dana dan penguatan kapasitas para pelaku usaha ekonomi umat.

Penelitian ini terdiri atas tiga tahap. *Pertama*, tahap pra-penelitian. Tahap ini meliputi perumusan proposal berdasarkan studi pendahuluan terkait pengembangan ekonomi umat berbasis kewirausahaan sosial. Bagian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan penggunaan penelitian sebelumnya. Langkah ini dilakukan sebelum periode penelitian lapangan. Data awal akan dikumpulkan dari sumber-sumber cetak terkait, selain juga sumber-sumber yang bersifat *online*, terutama jurnal-jurnal yang bersifat open journal system (OJS).

*Kedua*, tahap pelaksanaan penelitian. Tahap ini adalah fase penelitian lapangan dengan menelusuri berbagai dinamika dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi umat berbasis kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh tiga institusi

yang menjadi obyek riset. Langkah ini akan dilakukan melalui wawancara mendalam selama 2 - 3 minggu di provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.

*Ketiga*, tahap pascapenelitian lapangan. Tahap ini adalah fase menganalisis hasil wawancara mendalam. Hal ini memberi peluang kepada tim peneliti untuk melakukan diskusi lebih jauh dan mendapatkan catatan kritis dari para ahli ataupun praktisi pengembangan ekonomi masyarakat. Tahap ini diakhiri dengan mengkonstruksi data lapangan ke dalam satu format laporan akhir penelitian. Pada tahap akhir juga disusun draft manuskrip jurnal, dummy buku dan pencatatan HKI.

## BAGIAN 4 TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bisnis Mikro untuk Pengembangan Masyarakat

Pernahkah Anda memperhatikan ketertarikan publik terhadap budaya *start-up*? Gagasan ini semakin melekat dan diterapkan pada masalah sosial. Anda semua kemungkinan pernah menemukan atau menggunakan kata 'wirausaha'. Referensi paling awal untuk istilah 'kewirausahaan' ditelusuri kembali ke tahun 1755, ketika karya Richard Cantillon, *Essai sur la Nature du Commerce en Général*, diterbitkan secara anumerta (Cantillon, 1755). Karyanya berfokus pada sifat-sifat, dan ia memandang wirausaha sebagai kegiatan usaha yang memiliki kepribadian. Kewirausahaan dapat berupa “wirausaha dengan tingkat pengembalian yang tidak pasti” (Lambing dan Kuehl, 2003) dan “pembentukan organisasi”. Pada sisi ini, istilah tersebut semakin menjadi kata kunci yang dibicarakan banyak orang, walaupun istilah tersebut sebenarnya bukan hal yang baru. Secara tujuan, perusahaan memiliki kesamaan, 'kewirausahaan sosial telah memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara bidang sosial dan ekonomi. Kewirausahaan sosial adalah pendekatan berorientasi pasar yang baru untuk pengembangan sosial dengan penekanan pada inovasi sosial. Kemunculannya dalam dunia akademis definisi ini mulai disepakati.

Kewirausahaan sosial tampaknya menjadi salah satu istilah yang sering disalahpahami dalam sektor nirlaba. Sarjana semi kewirausahaan sosial, Nicholls dan Cho (2006) menguraikan perusahaan sosial sebagai perusahaan nirlaba, bisnis dengan tujuan sosial atau usaha yang menghasilkan pendapatan yang didirikan untuk mendukung atau menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin dan kurang beruntung, dan secara bersamaan beroperasi dengan mengacu pada garis bawah keuangan. Pendapatan yang dihasilkan terdiri dari pembayaran yang diterima dalam pertukaran langsung suatu produk, layanan, atau hak istimewa. Perusahaan sosial juga dapat dianggap sebagai bagian dari kegiatan di mana model komersial sengaja digunakan sebagai kendaraan untuk mencapai objek sosial (Nicholls & Huybrechts, 2016). Gambar di bawah ini menjelaskan spektrum kewirausahaan sosial.

Kewirausahaan sosial adalah salah satu cara inovatif untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan untuk keperluan produksi. Murray dan Underwood (2012) mengklaim bahwa perusahaan sosial dalam segala bentuknya dapat menciptakan peluang baru untuk "kewirausahaan berkelanjutan dan menjamin masa depan".

### B. Inklusivitas Wirausaha

Terlepas dari konsensus populer tentang definisi kewirausahaan sosial, kita harus ingat bahwa apa yang diterima sebagai universal umumnya didorong oleh model Eurocentric (Kelsky 2001, 4; Grosfoguel 2011). Beberapa cendekiawan dan lembaga mempertanyakan definisi di atas dengan keunggulan cara berfikir Anglo-Saxon melalui kehadirannya dalam beberapa konferensi, literatur akademik, dan pengakuan akademik (Unite for Sight, 2009; Wilhelm,

2009). Hingga sekitar tahun 2015, acara dan konferensi tentang kewirausahaan sosial umumnya terkonsentrasi di negara-negara Anglo-Saxon (Mohnot, 2009; Schwartz, 2009), tanpa adanya partisipasi dan perwakilan dari orang-orang yang tidak memiliki pengalaman keuangan negara berkembang.

Di mata investor Anglo-Saxon, kurangnya kualifikasi akademik dapat mewakili kurangnya bakat kewirausahaan yang membatasi gagasan inovatif dan beragam kewirausahaan sosial. John Alexis Guerra Gomez (Unite for Sight, 2009) menegaskan bahwa “wirausahawan sosial sejati adalah hantu yang tidak pernah mengklaim kemuliaan untuk diri mereka sendiri, karena hidup mereka bergantung padan diri mereka sendiri. Anda tidak menemukannya di kongres, seminar dan forum, mereka hidup untuk itu dan dengan itu. Akinyemi (2013), menambahkan bahwa wirausahawan sosial di negara berkembang memiliki aset, petani memiliki tanah dan pengetahuan, dan pedagang memiliki alat dan keterampilan. Namun, mereka tidak dikenal karena lokasi geografis, kurangnya kualifikasi dan kurangnya akses ke jaringan pemasaran teknologi. Masyarakat lokal mengambil inisiatif sendiri untuk rencana atau tindakan pengembangan kewirausahaan mereka sendiri dalam merespons masalah sosial. Bagi banyak orang, kewirausahaan sosial adalah "panggilan kebutuhan" (Unite for Sight, 2009).

Meskipun penting untuk memastikan inklusivitas dalam bidang kewirausahaan sosial, kesalahpahaman akan dapat dihindari, dengan adanya terminologi yang disepakati untuk menggambarkan dan pengaturan di lapangan. The Grameen Bank (2014) yang didirikan oleh Muhammed Yunus mendefinisikan pengusaha mikro sebagai "orang yang memiliki usaha kecil yang dikenal sebagai usaha mikro". Mereka biasanya mempekerjakan kurang dari lima orang. Mereka dapat menyediakan atau menambah sumber pendapatan. Definisi usaha mikro Uni Eropa adalah usaha komersial dengan kurang dari 10 karyawan, dengan omset tahunan di bawah 2 juta euro (Komisi Masyarakat Uni Eropa, 2003). Usaha mikro menambah nilai ekonomi suatu negara dengan menciptakan peluang pekerjaan, pendapatan, dan daya beli yang lebih kuat dan menambah peluang bisnis lebih lanjut, meskipun beberapa dari mereka mungkin memulainya bukan karena pilihan utama (Munoz, 2010; Karnani, 2007). Organisasi Perburuhan Internasional (ILO 2014) menyebut mereka sebagai “pekerja mandiri” yang merupakan wiraswasta.

Menurut Samer (2012), wirausahawan sosial beroperasi dalam batas-batas dua strategi bisnis yaitu: *Pertama*, nirlaba dengan strategi memperoleh pendapatan: di mana perusahaan sosial melakukan kegiatan sosial dan komersial hibrida untuk mencapai 'swasembada'. Kedua, mencari laba dengan strategi yang digerakkan oleh misi: di mana bisnis sosial yang mandiri secara finansial melakukan kegiatan sosial dan komersial secara bersamaan untuk mencapai 'keberlanjutan'. Dalam membahas kewirausahaan sosial yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, bab ini mengadopsi kedua definisi di atas dari Samer (2012)

### **C. Studi Kasus 1: East Bali Cashews (Bali)**

Keberadaan East Bali Cashews tidak pernah bisa dilepaskan dari nama Aaron Fishman, yang berkeliling dunia untuk mencari pengalaman baru dan

menarik. Hingga pada tahun 2012 dia tiba di Bali Timur, pada saat itu dia datang sebagai sukarelawan kesehatan dan gizi. Aaron Fishman sangat kagum dan takjub dengan keindahan dari wilayah Bali Timur dengan hutan lebatnya, lereng dengan bukit curam, gunung berapi, kebun campur sari dan komunitas yang sangat hidup dan bergairah. Tidak lama kemudian dia menyadari bahwa di balik keindahan alam dan budayanya yang unik, Bali Timur merupakan daerah yang cukup miskin. Pada saat itu Aaron melihat bahwa kacang mete sangat melimpah di Bali Timur, namun petani hanya menjualnya dengan harga rendah kepada para importir yang kemudian mengirimkan kacang mete tersebut ke luar negeri seperti Vietnam dan India untuk diproses lebih lanjut.

Ketertarikan Aaron Fishman terhadap dunia kuliner dan kewirausahaan, telah menginspirasinya untuk memulai usaha sosial yang tidak hanya dapat membantu para petani kacang mete di daerah tersebut menjadi lebih sejahtera, namun juga membuka peluang kerja untuk masyarakat di wilayah tersebut. Aaron Fishman meyakini bahwa usaha sosial yang dia pilih dengan memanfaatkan potensi lokal dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi warga lokal. Oleh karena itu, dengan cara memproses kacang mete di wilayah tersebut dan membeli hasil panen petani lokal, kemudian melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja, kegiatan usaha sosial ini akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.



Keterangan: *Kebun Mete di Karangasem yang menjadi bahan baku utama berbagai produk olahan East Bali Cashew* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Gagasan utamanya adalah kegiatan usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas hidup bagi petani dan keluarganya serta masyarakat lokal pada umumnya. Aaron membayangkan sebuah

perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara global dengan membuat makanan yang berkualitas melalui praktik bisnis yang jujur, transparan dan berkelanjutan. Perusahaan sosial ini memanfaatkan seluruh sumber bahan-bahan lokal segar dan organik untuk diolah menjadi produk yang menghasilkan makanan ringan berkualitas tinggi yang sehat, lezat, nikmat, dan bebas dari rasa khawatir.



Keterangan: *Kacang Mete mentah yang siap diolah* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Pada perusahaan social East Bali Cashew, setiap kacang yang dimanfaatkan dalam cemilan ini ingin membuktikan dan memastikan bahwa tidak ada kerja keras yang sia-sia. Tim East Bali Cashews menciptakan berbagai pilihan cemilan seperti; granola, muesli, campuran rasa, dan kacang mede panggang dan dengan berbagai rasa. Terlebih lagi, semua perasa yang digunakan berasal dari Bali, termasuk kelapa, rosella, cabai dan coklat, yang berusaha mewakili rasa khas dari wilayah ini. Pilihan rasa favorit dari East Bali Cashew favorit adalah kacang mede coklat, yang diproses menggunakan sumber lokal, bubuk coklat alami. Kacang mede dan popcorn caramel asin juga menjadi pilihan utama yang nikmat yang ditawarkan perusahaan ini.

Pada masa depan, perusahaan social ini berencana untuk memanfaatkan kembali total lahan seluas 77.000 hektar untuk ditanami kacang mede. Dalam dekade berikutnya akan lebih dipastikan fondasi pertanian yang sehat bagi komunitas petani mete di Bali. Mereka telah memodelkan bisnis mereka untuk menjangkau diluar komunitas Desa, untuk pengembangan dan mulai membuat dampak positif di wilayah lain. Bagian terpenting dari wirausaha sosial ini adalah skabilitas dan otonominya untuk membawa pembangunan ke tempat lain yang diperlukan.



Keeterangan: *Peneliti bersama staf East Bali Cashew di ruang galeri produksi, Karangasem Bali Timur* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Untuk menjaga seluruh proses tetap lokal, masing-masing produk ini dipastikan ditanam, dikemas dan disiapkan untuk pengiriman di satu pabrik. Memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat lokal adalah sesuatu yang tetap menjadi tujuan utama East Bali Cashews, bahkan untuk lima tahun kedepan. Saat ini, perusahaan ini telah berkembang pesat dan dapat dibeli beberapa toko di Bali hingga menjangkau ke penjualan internasional di Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat (East Bali Cashew, 2019).



Keterangan: *Beberapa contoh produk East Bali Cashew yang siap dipasarkan* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Setiap penjualan memungkinkan untuk menyediakan lebih banyak pekerjaan di Bali Timur. Sebagian besar pekerjaan itu diisi oleh perempuan lokal yang sebelumnya tidak bekerja dan sekarang mereka memiliki sumber pendapatan pribadi dan akses ke pendidikan serta pengembangan profesional. East Bali Cashews juga telah membangun sekolah taman kanak-kanak pertama di kawasan tersebut dibudidayakan profesional dan proyek peningkatan pertanian yang diimplementasikan. Program sosial mereka memastikan masyarakat untuk dapat belajar, berinovasi dan berkembang, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pada 2012, Aaron mendirikan sebuah pabrik kecil dengan bantuan beberapa mitra lokal. Kemudian pada 2013, *crow-funding* berdampak signifikan terhadap perluasan pabrik, yang saat ini dapat mempekerjakan sekitar 300 anggota masyarakat (kebanyakan dari mereka adalah wanita). Perusahaan ini didedikasikan untuk pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, terutama bagi perempuan, dan tingkat pekerjaan perempuan mencapai 85%. Sebelum pabrik didirikan, peluang kerja bagi perempuan hampir tidak sehingga kebanyakan saat itu perempuan bekerja di rumah.



Keterangan: *Halaman East Bali Cashew Karangasem, yang dipenuhi sepeda motor para pekerja yang seluruhnya berasal dari warga lokal* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Perusahaan East Bali Cashews juga telah mendirikan pusat pembelajaran usia dini untuk anak-anak berusia dua hingga enam tahun. Kesehatan gizi, fisik dan emosional para siswa juga menjadi aspek paling penting di pusat pembelajaran ini, lebih jauh para siswa didorong untuk melanjutkan pendidikan mereka sejauh yang mereka suka. Dengan fokus pada keberlanjutan dan mendukung masyarakat

lokal, East Bali Cashews adalah organisasi yang benar-benar tanpa pamrih, membantu petani lokal sekaligus memberikan produk yang lezat kepada dunia. Mereka juga telah mampu memberi dukungan keuangan kepada petani mete lokal, kesempatan kerja dan kesempatan Pendidikan, sementara hal-hal tersebut tergantung dengan berbagi produk lezat mereka tersebar dan dinikmati dunia.

Salah satu penawaran terbaru di East Bali Cashews adalah fasilitas pendidikan di sekitar pabrik. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Eco Lodge di lahan seluas 12 hektar, menghadap ke perbukitan, perendaman memungkinkan pengunjung untuk terlibat dengan proses produksi mete, bertemu penduduk setempat dan belajar lebih banyak tentang kondisi kehidupan di wilayah Bali Timur.

#### **D. Studi Kasus 2: Du' Anyam (Larantuka, Nusa Tenggara Timur)**

Du'Anyam adalah perusahaan sosial atau wirausaha sosial yang didirikan pada 2014 oleh Azalea Ayuningtyas dengan dua teman baiknya, Melia Winata dan Hanna. Saat ini, Du'Anyam telah menjangkau tidak kurang dari 100 desa di seluruh pelosok Nusantara, dengan basis utama di Larantuka dan Pulau Solor Nusa Tenggara Timur.

Du'Anyam memulai proyek pertamanya di kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Indonesia. Provinsi ini adalah salah satu provinsi termiskin, tercatat tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir tertinggi di Indonesia. Sebagian besar wanita hamil mengalami kekurangan finansial untuk menutupi biaya yang terkait dengan kehamilan. Data dari Survei Kesehatan Dasar Indonesia (2012) menunjukkan bahwa hanya 41% persalinan yang dilakukan di klinik kesehatan. Selain itu, sebagian besar wanita hamil di wilayah ini juga bekerja di ladang, kebun atau sawah untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga mereka.



Keterangan: *Kantor produksi Du'Anyam di Larantuka NTT* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Data menunjukkan bahwa 76% perempuan yang menjadi anggota Du;Anyam bekerja setiap hari di ladang tanpa memandang status kehamilan

(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014). Kondisi ini menghasilkan output energi yang tidak seimbang antara tenaga yang digunakan selama Bertani atau berladang dengan asupan nutrisi yang masuk kedalam tubuh mereka. Data menunjukkan bahwa terjadi Kekurangan Energi Kronis pada 45,5% wanita hamil, dan meningkatkan risiko komplikasi yang serius. Data menunjukkan di NTT, pada tahun 2013, lebih dari 250 kematian ibu hamil, 1300 kematian bayi baru lahir, dan 5000 bayi yang lahir dengan berat lahir dibawah normal (Survei Kesehatan Dasar Indonesia, 2014).



Keterangan: *Galeri produk anyaman DU'ANyam di Larantuka, Flores Timur, NTT*  
(Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Oleh karena itu, kehadiran awal Du'Anyam memang menawarkan solusi untuk masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat setempat. Usaha sosial ini memanfaatkan tradisi tenun yang ada, dengan menyediakan pekerjaan alternatif untuk wanita hamil. Pekerjaan ini dikategorikan bukan pekerjaan berat yang tidak dapat menyebabkan komplikasi kesehatan untuk mereka. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi alternative menjanjikan untuk menghasilkan pendapatan keluarga mereka.

Nama Du'anyam berarti 'ibu menenun', diambil dari kata Dua (bahasa Flores berarti ibu) dan anyam berarti menenun. Visi organisasi dapat digambarkan melalui tiga pilar utama; pemberdayaan perempuan, promosi budaya, dan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan.



Keterangan: *Para pengelola Du'Anyam sedang menjelaskan proses produksi dan kontrol kualitas sebelum produk dilepas ke pasar (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)*

Du'Anyam telah mampu memproduksi sekitar 1000 pasang sandal setiap bulan. Selain itu, masih ada model-model kerajinan unik lainnya seperti keranjang anyaman, kartu nama, sarung tangan, dompet, dan lain-lain. Du'Anyam juga dapat memproduksi barang sesuai pesanan pelanggan, biasanya mereka juga memehuni pesanan dari perusahaan dan hotel di sekitar pulau. Saat ini Du'Anyam juga telah berkolaborasi dengan merek-merek fashion seperti Cottonink, Contempo, dan Impromptu untuk menjangkau kaum muda yang secara sosial memiliki trend berbelanja lebih tinggi. Produk kerajinan Du'Anyam yang lucu dan unik kini dapat diperoleh secara online dan offline. Mereka juga berpengalaman untuk menyiapkan oleh-oleh untuk Asian Games 2018 yang akhirnya mendongkrak pasar mereka menjadi lebih luas.

Pada tahun 2018, platform kerajinan rotan Du'Anyam mengumumkan akuisisi investasi dari Northstar Foundation, yang merupakan bagian dari Northstar Group, modal ventura yang berbasis di Singapura, dengan nilai yang dirahasiakan. Direncanakan bahwa dana segar akan digunakan untuk mengembangkan bisnisnya melalui desain dan meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas bagi perempuan di daerah pedesaan.

Mereka meluncurkan tradisi anyaman sebagai sebuah ide yang memiliki peluang bisnis yang besar dengan menyediakan desain modern dan akses pasar yang luas. Selanjutnya, mereka juga bermitra dengan platform e-commerce seperti Kuka, Qlapa, Bridestory, SoooooS (Jepang), dan Kisaku Heritage (Australia). Sementara untuk penjualan offline, mereka juga telah berhasil membangun kemitraan dengan BIKA living, Alun-Alun Indonesia, Oberoi, Klub Liburan Marriot, Toyota Indonesia, Bank DBS, dan BRI.

Terkait masalah strategi pemasaran, mereka juga memasarkan produk tenun perusahaan-perusahaan besar dan individu. Target pasar pertama memungkinkan mereka untuk mendapatkan pesanan dengan jumlah besar dan terus menerus, sedangkan pasar perorangan akan mampu menjangkau lebih banyak

penerima manfaat untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi melalui toko ritel dan online dalam waktu singkat dan lebih cepat. Saat ini, ada lebih dari 200 resort bintang lima dan 70 vila pribadi di Bali membutuhkan pasokan sandal dalam ruangan untuk para tamunya. Lebih dari itu, teknologi yang sederhana, dasar, dan relevan digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk.



Keterangan: *Manajer operasional Du'Anyam menjelaskan filosofi perusahaan yang berorientasi pada kesejahteraan warga lokal* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Du'Anyam membantu melestarikan keterampilan menenun yang mulai menghilang pada generasi muda. Beberapa jenis produk tenunan lucu seperti keranjang sob yang mulai punah, juga diselamatkan. Du'Anyam telah memberikan bantuan tenun untuk perempuan di Flores Timur sejak 2015 dan saat ini jumlahnya telah mencapai 500 penenun yang tersebar di 22 desa dengan menciptakan produk anyaman melalui pengerjaan paling otentik. Du'Anyam telah berhasil menjual produk-produk anyaman wanita tidak hanya pasar nasional, tetapi juga ke negara-negara lain seperti Amerika, Jepang, Kanada dan Milan.

Du'Anyam juga telah mampu meningkatkan pendapatan wanita hingga 40%. Bahkan, sebagai sumber pendapatan alternatif, perempuan di Flores bisa menghasilkan pendapatan sekitar Rp 500.000 per bulan, yang nantinya bisa tabung. Penghasilan tambahan memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan mereka dengan adanya uang tunai sepanjang tahun mereka mampu membeli makanan bergizi, mengkasas layanan kesehatan, dan pendidikan. Saat ini, 67 siswa dari anak-anak dan cucu-cucu perempuan pengrajin rotan juga telah menerima beasiswa dari perusahaan ini.

### **E. Studi Kasus 3: Sidegon (Maluku Utara)**

Sidegon adalah sebuah perkumpulan hampir seratus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, Halmahera dan Morotai. Secara formal, Sidegon yang digagas oleh aktivis ekonomi kerakyatan Muchtar Adam mengambil bentuk Koperasi. Sebagai galeri tempat usaha bersama berbagai UKM yang terhimpun, Sidegon

memiliki tempat jualan bersama yang dinamakan Fala Sidegon, yang terletak di Jalan Sultan Kاهرun Soa Sio Ternate, Maluku Utara.



Keterangan: *Proses pendampingan anggota UMKM yang terhimpun dalam Sidegon, Ternate, Maluku Utara* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Menurut Mukhtar Adam, Sidegon adalah bentuk kewirausahaan sosial yang berorientasi untuk mengangkat level kesejahteraan para anggota yang tersebar di 88 UMKM yang ada di se antero Maluku Utara. Sidegon sendiri terbentuk dari kumpulan pelaku UMKM dan akademisi yang memiliki kesamaan visi tentang pentingnya kolaborasi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Istilah “Sidegon” sendiri, menurut Mukhtar Adam, dalam Bahasa Ternate artinya mendudukan, dan Gon memiliki makna jualan. Jadi, Sidegon memiliki makna kurang lebih sebagai mendudukan jualan, yakni respons atas berbagai upaya mendorong pembudayaan kewirausahaan di Maluku Utara yang rasio warganya relatif masih sangat rendah terlibat dalam usaha-usaha kewirausahaan.



Keterangan: *Warga lokal Tibelo yang mengelola tepung kelapa* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

Sebagai bentuk kolaborasi bisnis, budaya dan sosial melakukan berbagai Kerjasama dengan sejumlah perusahaan besar untuk mendorong pengrajin lokal dalam mengembangkan usaha mereka, yang salah satunya adalah pembuatan topi khas Ternate yang disebut dengan istilah Tuala Lipa. Bahkan, Tuala Lipa ini juga kemudian dijadikan sebagai simbol atau logo Sidegon. Melalui kolaborasi dengan berbagai perusahaan, Sidegon mendorong para pengrajin lokal yang tersebar di berbagai UMKM untuk memproduksi Tuala Lipa sekaligus untuk melestarikan kearifan lokal yang potensial punah dimakan zaman jika tidak terus dijaga dan dilestarikan.



*Keterangan: Peneliti mengenakan topi khas Ternate Tuala Lipa yang juga menjadi simbol Sidegon (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)*

Dalam beberapa tahun terakhir, untuk meningkatkan kapasitas kewirusahaan para anggotanya, Sidegon melakukan berbagai upaya, seperti pendampingan pasar, membuka akses pasar produk UMKM, termasuk pembinaan dan pelatihan kewirausahaan dengan menggandeng Fakultas Ekonomi Universitas Khaerun Ternate. Sidegon hadir sebagai jembatan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong pembudayaan entrepreneurship di Maluku Utara. Dengan demikian, Sidegon adalah rumah ebersama bagi upaya pembudayaan kewirausahaan bagi pelaku local. Untuk mengembangkan usahanya, Sidegon menjalin Kerjasama perbankan, terutama dengan BNI dan BRI, untuk mendukung penyediaan berbagai lapak, seperti lapak Sidegin Soa Sio, lapak Fala Sidegon di Takoma dan lapak Sidegon di halaman parker Hotel Sahid.



Keterangan: *Fala Sidegon Ternate yang menjadi gerai bersama tempat para anggota UMKM menaruh produknya* (Sumber foto: Dokumen pribadi peneliti)

#### **F. Perusahaan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Warga Lokal**

Perusahaan sosial dianggap sebagai katalis untuk pengembangan lokal dan regional yang berkelanjutan. Kim dan Lim (2017) menyatakan bahwa perusahaan sosial dapat menjadi katalisator bagi pembangunan lokal berkelanjutan dengan efek positifnya yang dapat memengaruhi pembangunan lokal dan regional dan mampu memenuhi kebutuhan lokal tersebut, juga menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat, dan lebih jauh dapat mengembangkan aset relasional dalam proses bisnis, dan memulihkan solidaritas komunitas. Perusahaan-perusahaan sosial ini secara tidak langsung mampu mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh penduduk setempat. Pada kenyataannya, wirausahawan sosial yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya lokal dan menggabungkannya dengan teknologi dan inovasi terbaru dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan membuat lingkungan lebih berkelanjutan.

Ada dua poin penting yang dapat digambarkan dari tiga studi kasus di atas. *Pertama*, ketiga kasus ini menunjukkan cara unik pendekatan terhadap masyarakat yaitu dengan mengkomersilkan masalah sosial setempat. Kasus pertama, East Bali Cashews berinvestasi dalam sumber bahan segar dan organik yang tersedia secara lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan pada saat yang sama menghasilkan makanan ringan berkualitas tinggi yang sehat, lezat, dan nikmat. Kasus kedua, dari Du'Anyam, menunjukkan strategi unik mereka untuk memastikan bahwa sekelompok dengan empat wanita, yang salah satunya sedang hamil, juga dapat terus mendapatkan dan mempertahankan pendapatan melalui sistem koperasi pertanian dan tenun. Mengkomersilkan masalah sosial lokal, pada kenyataannya, identik dengan gagasan Menciptakan Nilai Bersama yang diusulkan oleh Porter dan Kramer (2011), sebuah konsep yang diperluas yang memasukkan masalah sosial ke dalam strategi dan operasi bisnis. Hal ini menurut Porter dan

Kramer (2011), akan memunculkan keunggulan kompetitif dan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Dengan kata lain, begitu Anda mengidentifikasi masalah sosial, Anda akan mengubahnya menjadi peluang dan memanfaatkannya untuk menumbuhkan dan mempertahankan bisnis Anda. Ini, memang, memungkinkan kita untuk melihat masalah sosial dari kacamata yang berbeda dan menganggap masalah sebagai 'aset' masyarakat.

*Kedua*, ketiga kasus ini juga mencerminkan faktor penting dari pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset. Selain melihat masalah sosial sebagai aset, ketiga kasus ini menggambarkan betapa menghargai nilai-nilai, budaya, dan tradisi penduduk setempat berkontribusi pada pengembangan lokal dan regional. Khusus untuk kasus kedua, Du Anyam memanfaatkan karyawan wanita lokal untuk memastikan mereka sebagai produsen produk dan karyawan diberi tahu tentang pentingnya anyaman untuk menopang kehidupan mereka. Mereka kemudian, menjadi katalis lokal yang tidak hanya menghasilkan pendapatan dan menopang rumah tangga keluarga mereka, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembalut wanita untuk mempertahankan angka partisipasi dan tingkat pendidikan mereka untuk keseluruhan ekonomi nasional mereka. Selain itu, mereka memanfaatkan sumber daya mereka yang ada yang merupakan keterampilan menenun perempuan, keterampilan bertani dan kepercayaan mereka bahwa mereka saling memiliki di antara satu sama lain dalam kelompok untuk terus bekerja bersama.

Kasus ini secara khusus membawa contoh yang baik untuk mengidentifikasi 'aset' sebagai gagasan beragam dari keterampilan, sumber daya manusia, dan dinamika hubungan sosial seperti kepercayaan yang berfungsi sebagai pelumas untuk bisnis koperasi. Karena perbedaan mekanisme politik, ekonomi dan sosial antara negara maju dan negara berkembang, kepercayaan - mata uang yang tidak menghasilkan uang - tampaknya menjadi topik investigasi akademik yang sering relevan dengan kewirausahaan. Pada banyak negara di mana kepercayaan dan keandalan tidak diamati dalam pemerintah atau mekanisme sosial (misalnya korupsi, penyuapan, kurangnya kerangka hukum untuk bisnis dan industri), pengusaha bisnis harus dibangun di atas jaringan kepercayaan yang ada daripada menciptakannya. Karena itu, seperti yang disimpulkan Khanna (2018), menemukan dan membangun kepercayaan dan pemanfaatan yang ada, ini adalah titik awal bagi wirausahawan komunitas dalam mengatasi tantangan sosial.

Jaringan kolaboratif juga merupakan kunci keberhasilan dalam usaha sosial masyarakat. Pentingnya jaringan kolaboratif untuk usaha sosial dalam platform produksi, konsumsi dan redistribusi tidak dapat diabaikan (Roh, 2016). Banyak perusahaan termasuk perusahaan sosial hari ini telah mulai merangkul dan mengembangkan jaringan kolaboratif untuk menciptakan nilai. Mereka memahami bahwa ide dapat datang dari siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Beberapa perusahaan telah menunjukkan bagaimana mereka mengambil keuntungan dari pola pikir kolaboratif baru ini dan memanfaatkan kekuatan yang ditawarkan jaringan (Moore, 2011). Bahkan, perusahaan yang dapat membuat atau berpartisipasi dalam jaringan kolaboratif dan memposisikan diri mereka sendiri untuk mengambil manfaat terbaik akan dapat menikmati keunggulan kompetitif.

Perusahaan sosial yang sukses dari semua ukuran dapat dimulai dengan mendirikan jaringan pakar internal, pemasok, mitra, dan pelanggan. Bahkan ada platform teknologi atau alat kolaborasi seperti platform eXo, Jamespot, Jive-n, Joincube, atau yang paling terkenal dan marak; Facebook, yang dapat segera digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi ini (Walsh, 2018). Dengan menggunakan platform ini, konektivitas sosial dan berbagi data menjadi lebih mudah di antara karyawan, mitra, pemasok, dan pelanggan.

Penting juga untuk memiliki pengetahuan tentang lingkungan dan kebutuhan langsung masyarakat, dan untuk dapat secara fleksibel mengambil tindakan yang sesuai untuk mempertahankan posisi bisnis mereka. Kemajuan teknologi di mana pengusaha komunitas dapat mengambil keuntungan untuk bisnis mereka kadang-kadang disebut sebagai inovasi yang mengganggu (Christensen dan Bower, 1995), yang menciptakan pasar baru dengan menemukan pelanggan baru dan kategori produk - memanfaatkan teknologi dan model bisnis baru (Christensen, 1997). Inovasi dapat menggantikan jenis teknologi sebelumnya (kamera Kodak atau Instagram; Skype / Google Hangout atau WhatsApp; CD / iTunes atau Spotify) atau model organisasi (bisnis atau bisnis sosial) yang memengaruhi bisnis yang ada. Ini adalah kemajuan dalam pemikiran tentang gagasan Schumpeter tentang "penghancuran kreatif", sesuatu yang menekankan potensi keuntungan yang bisa diperoleh dengan merangkul daripada menentang perubahan (Schumpeter, 1942). Dari sini dapat disimpulkan bahwa Fleksibilitas dalam wirausaha komunitas menjadi kunci penting untuk diperhatikan.

Namun, tidak ada ukuran kualitas yang cocok untuk semua pengusaha yang 'sukses' - baik di tingkat masyarakat atau di tingkat nasional. "Model Big-5" (keterbukaan, kesadaran, extraversion, keramahan dan neurotisisme), orientasi detail, kreativitas dan visi jangka panjang adalah beberapa karakteristik yang biasanya dibahas sebagai ciri-ciri pribadi pengusaha 'sukses' (Schumpeter, 1934; Yarzebinski, 1992; Richardson, 1994; Lambing dan Kuehl, 2003; Drucker, 2012; Yehezkiel dkk., 2018; Kerr, 2017). Seperti yang diharapkan; Namun, ini dapat bervariasi sesuai dengan konteks ekonomi dan sosial di mana pengusaha melakukan kegiatan mereka. Penting untuk mengingat konteks sistemik yang berbeda yang berperan dalam pengembangan kewirausahaan.

Alhasil, bagian ini memberi Anda empat contoh pengembangan kewirausahaan komunitas. Bagian ini dimulai dengan menjelaskan gagasan kewirausahaan, kewirausahaan sosial, dan kegiatan bisnis yang berorientasi sosial terutama bidang pengembangan masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat keberlanjutan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat. Kewirausahaan sosial bukanlah konsep baru, namun merupakan topik penting untuk dijelajahi bagi para praktisi pengembangan masyarakat untuk mengkomersialkan masalah sosial yang difokuskan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat berinvestasi kembali dalam menciptakan produk atau layanan lebih lanjut, yang juga memiliki dampak sosial.

Definisi kewirausahaan sosial yang inklusif juga dibahas, terutama dengan menggunakan lensa pengembangan internasional untuk masyarakat termarginalisasi. Kita harus ingat bahwa gagasan kewirausahaan sosial diterima

"universal" karena umumnya didorong oleh model Eurocentric. Keunggulan dari pola pikir Anglo-Saxon dalam hal ini cukup jelas melalui kehadiran yang dominan dalam konferensi, literatur akademik dan pengakuan akademik dari MBA. Namun, bagi banyak orang, kewirausahaan sosial adalah "panggilan kebutuhan" (Unite for Sight, 2009) dan pengusaha komunitas tidak dapat hanya ditemukan dalam konferensi global yang sepertinya juga membawa legitimasi dan pengakuan dari masyarakat.

## BAGIAN 5 KORPUS PENUTUP

Tiga studi kasus yang diperkenalkan adalah East Bali Cashews, Du'Anyam dari dan Sidegon. Ada dua petunjuk pembelajaran utama yang dapat diambil dari tiga kasus ini. *Pertama*, penting untuk dipahami masalah social, seperti halnya kesejahteraan masyarakat, dapat diselesaikan dengan melihatnya sebagai aset dan meluangkan waktu untuk mengeksplorasi dan mengkomersialkan masalah sosial lokal. Ini mirip dengan gagasan untuk menciptakan nilai bersama oleh Porter dan Kramer (2009) di mana memasukan masalah sosial ke dalam strategi dan operasi bisnis akan memunculkan keunggulan kompetitif dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Ketiga kasus ini juga mencerminkan faktor penting dari pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset.

*Kedua*, selain melihat masalah sosial sebagai aset, ketiga kasus ini menggambarkan betapa menghargai nilai-nilai, budaya, dan tradisi penduduk setempat berkontribusi pada pengembangan lokal dan regional. Kasus-kasus ini membawa contoh yang baik untuk mengidentifikasi 'aset' sebagai gagasan beragam dari keterampilan, sumber daya manusia, dan dinamika hubungan sosial seperti kepercayaan yang berfungsi sebagai pelumas untuk bisnis koperasi. Pada negara-negara di mana kepercayaan dan keandalan tidak diamati dalam pemerintah atau mekanisme sosial (misalnya, korupsi, penyuapan, kurangnya kerangka hukum untuk bisnis dan industri), pengusaha bisnis harus membangun di atas jaringan kepercayaan yang ada daripada menciptakannya. Karena itu, seperti yang disimpulkan Khanna (2018), menemukan dan membangun kepercayaan dan pemanfaatan yang ada, ini adalah titik awal bagi wirausahawan komunitas dalam mengatasi tantangan sosial yang ada.

Memang, jaringan kolaboratif untuk pengusaha komunitas sangat penting dalam *platform* produksi, konsumsi, dan redistribusi. Komunitas dan perusahaan sosial yang sukses dari semua ukuran dan skala dapat dimulai dengan mendirikan jaringan pasar internal, pemasok, mitra, dan pelanggan. Dengan menggunakan *platform* ini, konektivitas sosial dan berbagi data menjadi lebih mudah di antara karyawan, mitra, pemasok, dan pelanggan. Penting juga untuk memiliki pengetahuan tentang lingkungan dan kebutuhan pelanggan secara langsung, dan untuk dapat secara fleksibel mengambil tindakan yang sesuai untuk mempertahankan kelangsungan bisnis mereka sehingga dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah-masalah sosial di dalam komunitas dan sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Atikullah. 2017. "A Comparison between Malaysia and Indonesia in Islamic Banking Industry." *Research Journal of Business and Management* 4 (3):276-286.
- Adloff, Frank. 2009. "What Encourages Charitable Giving and Philanthropy?" *Ageing and Society* 29 (8):1185-1205. doi: 10.1017/S0144686X08008295.
- Adloff, Frank, and Steffen Mau. 2006. "Giving Social Ties, Reciprocity in Modern Society." *European Journal of Sociology* 47 (1):93-123. doi: 10.1017/S000397560600004X.
- AFRIPads. 2019. "Our Impact." accessed November 7. <https://www.afripads.com/our-impact/>.
- Ahmed, Maram. 2019. "How Traditional Islamic Giving Can Play a Role in the Future of Aid." accessed August 4. [www.weforum.org/agenda/2019/05/islamic-social-finance-humanitarian-aid-charity-climate-change/](http://www.weforum.org/agenda/2019/05/islamic-social-finance-humanitarian-aid-charity-climate-change/).
- Akinyemi, Julius O, John Dilyard, Dennis Anderson, and Katja Schroeder. 2013. "Innovation and Technology for Social Enterprises." United Nations, accessed July 17. <http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2013/ict/innovation-technology-social-enterprises>.
- Asian Development Bank. 2018. "Closing the Financing Gap in Asian Infrastructure." accessed August 5. <https://www.adb.org/publications/closing-financing-gap-asian-infrastructure>.
- Berlinski, Claire. 2008. *There Is No Alternative: Why Margaret Thatcher Matters*. New York: Basic Books.
- Business Call to Action. 2019. "Afripads: Simple Personal Hygiene Solution Changing Women's Lives." accessed February 7. <https://www.businesscalltoaction.org/member/afripads>.
- Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index. (2018). *A Global View of Giving Trends*.
- Cantillon, Richard 1755. *Essai Sur La Nature Du Commerce En General*. edited by Henry Higgs. London: Macmillan. Original edition, 1755.
- Cerović, L., S. Suljić Nikolaj, and D. Maradin. 2017. "Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banking: Importance of Market Regulation." *Ekonomika misao i praksa* 1:241-263.
- Chaaban, Jad, and Wendy Cunningham. 2011. Measuring the Economic Gain of Investing in Girls: The Girl Effect Dividend. In *Policy Research Working Paper* The World Bank, Human Development Network. Children and Youth Unit and Poverty Reduction and Economic Management Network, Gender Unit.
- Christensen, Clayton. 1997. *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Boston: Harvard Business School Press.

- Christensen, Clayton, and Joseph L. Bower. 1995. "Disruptive Technologies: Catching the Wave." *Harvard Business Review* January-February.
- Commission of the EU Communities. 2003. "Commission Recommendation Concerning the Definition of Micro, Small and Medium Sized Enterprises." *Official Journal of the European Union* 46 (124):36-41.
- DiMaggio, P. J. & Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 8(2).
- Domini, Amy. 2001. *Socially Responsible Investing: Making a Difference and Making Money*. Illinois: Kaplan Professional Company.
- Drucker, Peter. 2012. *Innovation and Entrepreneurship*. Hoboken, New Jersey: Taylor and Francis.
- Ezekiel, Ayoade Omisade, Ogunnaike Olaleke, Adegbuyi Omotayo, Fatai Lawal, and Onakoya Femi. 2018. "Data on Empirical Investigation of Direct and Indirect Effect of Personality Traits on Entrepreneurs' Commitment of Smes." *Data in Brief* 19 (1):1171-1175.
- East Bali Cashews. 2018. "Our Impact" accessed 7 September 2019. <https://www.eastbalicashews.com/employment-professional-dev-culture>
- Fauzia, A. 2013. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill.
- Faldini, M. (2017). Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1).
- Firdaus, N. (2014). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 22(1).
- Fitria, A. (2017). Social Entrepreneurship dalam Perspektif Maqashid Alsyariah. *Jurnal Iqtisad*, 4(1).
- Fortunato, M.W. P., & Alter, T. (2015). Community Entrepreneurship Development: An Introduction. *Community Development*. 46(5).
- Gordon, J. A Stage Model of Venture Philanthropy. (2014). *Venture Capital*, 16(2).
- Griffin, Jenny. 2014. "Afripads: Keeping Girls in School Every Month." accessed November 5. <https://impactalpha.com/afripads-keeping-girls-in-school-every-month01/>.
- Grosfoguel, Ramón. 2011. "Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality." *Transmodernity* 1 (1):1-36.
- Hijriah, H.Y. (2016). Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan. *Jurnal Tsaqafah*, 3(1).
- Ibrahim, Barbara Lethem. 2008. *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*. Cairo: The American University in Cairo Press.
- ILO. 2014. Global Employment Trends: Risk of a Jobless Recovery. Geneva: International Labour Organisation.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. 2017. *Ethical Dimensions of Islamic Finance : Theory and Practice*. Cham, SWITZERLAND: Palgrave Macmillan US.

- Jones, C. (2015). "What Is a Social Enterprise? Defining Social Enterprise and Social Business." <https://www.clearlyso.com/what-is-a-social-enterprise-2/>.
- John, Rob. 2017. "Why Investing in "Good" Goes a Long Way." Eco-business, accessed May 8. [https://www.academia.edu/32214126/Why\\_investing\\_in\\_good\\_goes\\_a\\_long\\_way\\_2017](https://www.academia.edu/32214126/Why_investing_in_good_goes_a_long_way_2017)
- John, Rob, Rhodri Davies, and Louisa Mitchell. 2007. *Give and Let Give; Building a Culture of Philanthropy in the Financial Services Industry*. London: Policy Exchange.
- Jones, Clare. 2015. "What Is a Social Enterprise? Defining Social Enterprise and Social Business." accessed June 2. <https://www.clearlyso.com/what-is-a-social-enterprise-2/>.
- Karnani, Aneel. 2007. "Microfinance Misses Its Mark." *Stanford Social Innovation Review*, 33-40.
- Kawaguchi, Mariko. 2014. "Environment, Society, and Governance Report." Daiwa Institute of Research, accessed August 29. [http://www.dir.co.jp/research/report/esg/esg-report/20140602\\_008572.html](http://www.dir.co.jp/research/report/esg/esg-report/20140602_008572.html).
- Kelsky, Karen. 2001. *Women on the Verge: Japanese Women, Western Dreams*. Durham: Duke University Press.
- Kerr, Sari Pekkala, William R. Kerr, and Tina Xu. 2017.
- Khanna, Tarun. 2018. *Trust: Creating the Foundation for Entrepreneurship in Developing Countries*. Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Lalani, Sofeena. 2019. "Islamic Social Finance: The Future of Humanitarian Partnership?", accessed August 4. <https://www.bond.org.uk/news/2019/02/islamic-social-finance-the-future-of-humanitarian-partnership>.
- Lambing, Peggy, and Charles Kuehl. 2003. *Entrepreneurship*. Third ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Lyons, T. S. (2015). Entrepreneurship and Community Development: What Matters and Why? *Community Development Journal*, 15 Sept.
- Minor, Allison. 2015. "Zakat and Development Finance: Filling the Gaps." accessed November 15. <http://aiddata.org/blog/zakat-and-development-finance-filling-in-the-gaps>.
- Mod er, Ulrika. 2018. "Unlocking Islamic Social Finance to Help Communities Address Vulnerability and Inequality." accessed August 5. [https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/speeches/2018/Unlocking\\_Islamic\\_Social\\_Finance\\_to\\_Help\\_Communities\\_Address\\_Vulnerability\\_and\\_Inequality.html](https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/speeches/2018/Unlocking_Islamic_Social_Finance_to_Help_Communities_Address_Vulnerability_and_Inequality.html).
- Mohnot, Ashni. 2009. "Coaxing Ghost Social Entrepreneurs out of the Woodwork." *Weblog The Pop!Tech Blog*, August 24. <http://www.poptech.org/blog/index.php/archives/4121>.
- Munoz, Joseph Mark S. 2010. *Contemporary Microenterprise*. Edited by Joseph Mark S. Munoz. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

- Murray, Alan, and Sarah Underwood. 2012. *Social and Sustainable Enterprise : Changing the Nature of Business, Contemporary Issues in Entrepreneurship Research*. Bingley, U.K.: Emerald Book Serials and Monographs. Book.
- Najma, S. (2016). Kewirausahaan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Sarwah: Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim*, 15(1).
- Nicholls, Alex, and Albert Hyunbae Cho. 2006. "Social Entrepreneurship: The Structuration of a Field." In *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*, edited by Alex Nicholls, 99-118. Oxford: Oxford University Press.
- Nicholls, Alex, and Benjamin Huybrechts. 2016. "Sustaining Inter-Organizational Relationships across Institutional Logics and Power Asymmetries: The Case of Fair Trade." *Journal of Business Ethics* 135 (4):699-714. doi: 10.1007/s10551-014-2495-y.
- Nurhayati, Ela. 2019. "Community Perceptions of the Implementation of Zakat-Based Microfinance as an Effective Community Development Program: A Case Study of Zakat-Based Microfinance (Kopmu) of Da'arut Tauhid Peduli, Indonesia." Master of International Community Development, College of Arts and Education, Victoria University.
- Openshaw, Jennifer. 2015. "'Socially Responsible' Investing Has Beaten the S&P 500 for Decades." accessed September 6. <http://www.marketwatch.com/story/socially-responsible-investing-has-beaten-the-sp-500-for-decades-2015-05-21>.
- Safei, A.A. Development of Islamic Society Based on Majelis Ta'lim: A Study of the Shifting Role of the Majelis Ta'limin West Java. (2016a) *American Journal of Applied Sciences*. 13(8).
- Richardson, Leon. 1994. "The Successful Entrepreneur." *Asian Business* 30 (7):71.
- Revelli, Christophe. 2017. "Socially Responsible Investing (Sri): From Mainstream to Margin?" *Research in International Business and Finance* 39:711-717. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.11.003>.
- Safei, A.A. Islam and Socio-Ecological Problem. (2016b). *Man in India*. Issue 96 (8).
- Safei, A. A. The Development of Islamic Society Based on Celestial Business. (2016). *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 24(1).
- Samer, A.S. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries. *Technology Innovation Management Review*.
- Schumpeter, Joseph. 1934. *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Cambridge: Harvard University Press.
- Schwartz, Rodney. 2009. "Are the Only Innovations in Social Entrepreneurship Anglo-Saxon?", Last Modified 22 Jun 2009, accessed September 2. <http://archive.skoll.org/2009/05/04/are-the-only-innovations-in-social-entrepreneurship-anglo-saxon/>
- Saragih, R. (2017). *Membangun Usaha*

- Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat Melalui Penerapan Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Kewirausahaan*. 3(2).
- Sofia, I.P. Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian. (2015). *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*. 2(2).
- Utomo, H. Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial. (2014). *Jurnal Among Makarti*. 7(1).
- Widiastuti, R. Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori dan Perannya Bagi Masyarakat. (2011). *Jurnal Manajemen*. 11(1).
- Widigdo, Aslam Mei Nur, Marimin Idqan Fahmi, and Irfan Syauqi Beik. 2016. "How Islamic Is Islamic Banking in Indonesia?" *JKAU: Islamic Econ*. 29 (2):153-165.
- Yarzebinski, Joseph A. 1992. "Understanding and Encouraging the Entrepreneur." *Economic Development Review* 10 (1):32-35.

Dalam konteks pengembangan dan peningkatan kesejahteraan umat, menarik menelaah lebih jauh terkait fenomena kelahiran lembaga yang bergerak dalam kewirausahaan sosial, atau social enterprise, di berbagai daerah di tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Tiga yang kemudian menjadi lokus kajian buku ini adalah East Bali Cashews, Du'Anyam di Larantuka Nusa Tenggara Timur, dan Sidegon di Maluku Utara. Menarik bahwa ketiga institusi kewirausahaan sosial ini juga merepresentasikan komunitas keagamaan yang berbeda: Islam, Kristen dan Hindu.

Secara umum, hasil buku ini menunjukkan: Pertama, penting untuk memahami masalah sosial, seperti halnya kesejahteraan masyarakat, dapat diselesaikan dengan melihatnya sebagai aset untuk mengeksplorasi dan mengkomersialkan masalah sosial lokal. Ini mirip dengan gagasan untuk menciptakan nilai bersama oleh Porter dan Kramer (2009) di mana memasukan masalah sosial ke dalam strategi dan operasi bisnis akan memunculkan keunggulan kompetitif dan kelangsungan bisnis jangka panjang. Ketiga kasus ini juga mencerminkan faktor penting dari pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset.

Kedua, selain melihat masalah sosial sebagai aset, ketiga kasus ini menggambarkan betapa menghargai nilai-nilai, budaya, dan tradisi penduduk local berkontribusi pada pengembangan kesejahteraan warga lokal. Kasus-kasus ini membawa contoh yang baik untuk mengidentifikasi 'aset' sebagai gagasan beragam dari keterampilan, sumber daya manusia, dan dinamika hubungan sosial seperti kepercayaan yang berfungsi sebagai pelumas untuk bisnis kewirausahaan sosial

